



2019 LAPORAN TAHUNAN

PT JAMKRIDA JABAR



KATA PENGANTAR

PT Jamkrida Jabar lahir untuk menjadi solusi bagi KUMKM sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit milik Pemerintah Jawa Barat. Dengan niat luhur meningkatkan kegiatan ekonomi KUMKM dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat, serta berkat dukungan dan bantuan berbagai pihak, Perseroan secara bertahap mampu meletakkan pondasi awal sebagaimana yang diharapkan dalam proses pendiriannya yaitu salah satu motor penggerak pengembangan KUMKM dan perekonomian Jawa Barat.

Dalam perkembangannya, peran PT Jamkrida Jabar mulai dirasakan KUMKM dalam membantu akses permodalan ke lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. PT Jamkrida Jabar memiliki tekad yang kuat untuk selalu bertumbuh dan berkembang secara positif guna mempertahankan dan meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian Jawa Barat khususnya bagi pengembangan ekonomi KUMKM.

Laporan Tahunan PT Jamkrida Jabar disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan Perusahaan selama tahun 2019. Selain laporan keuangan, Laporan Tahunan ini juga menyajikan aktivitas Perseroan dalam usahanya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, juga prospek Perseroan selama tahun 2019.

Laporan Tahunan ini juga sebagai wujud penerapan *Good Corporate Governance* sebagai langkah transparansi informasi dan semakin memantapkan keberadaan Perseroan di tengah perkembangan ekonomi Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Adapun dasar penyusunan Laporan Tahunan ini, meliputi:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Anggaran Dasar Perusahaan.
- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2018
- Laporan Keuangan *Audited* periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Laporan hasil *self assessment Good Corporate Governance*.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
LAPORAN MANAJEMEN	v
A. Laporan Dewan Komisaris.....	v
B. Laporan Dewan Pengawas Syariah	viii
C. Laporan Direksi.....	xii
D. Tanggung Jawab Pelaporan Tahunan.....	xvii
BAB I KILAS KINERJA PERSEROAN	1
1.1 Ikhtisar Kinerja	1
1.2 Ikhtisar Keuangan	2
1.3 Ikhtisar Operasional.....	4
1.4 Peristiwa Penting PT Jamkrida Jabar	5
BAB II PROFIL PERSEROAN	9
2.1 Sekilas Perseroan	9
2.2 Filosofi Logo Perseroan.....	10
2.3 Tonggak Sejarah.....	12
2.4 Visi Misi Perseroan	20
2.5 Nilai-Nilai Perseroan	20
2.6 Kegiatan Usaha	21
2.7 Komposisi Pemegang Saham	21
2.8 Profil Dewan Komisaris	22
2.9 Profil Dewan Pengawas Syariah.....	23
2.10 Profil Direksi	24
2.11 Komposisi Karyawan	25
2.12 Struktur Organisasi.....	26
BAB III KINERJA PERSEROAN.....	29
3.1 Aspek Penjaminan.....	30
3.2 Aspek Keuangan.....	35
3.3 Aspek Manajemen Risiko	37
3.4 Aspek Sumber Daya Manusia.....	42

3.5	Aspek Umum.....	47
3.6	Aspek Teknologi dan Kesisteman	48
3.7	Aspek Pengawasan.....	48
BAB IV	UNIT USAHA SYARIAH.....	51
BAB V	PROSPEK DAN PENGEMBANGAN USAHA.....	57
BAB VI	KEBIJAKAN DIVIDEN	59
BAB VII	RENCANA DAN STRATEGI BISNIS TAHUN 2020	61
BAB VIII	RENCANA KERJA TAHUN 2020	64
BAB IX	TATA KELOLA PERSEROAN.....	71
9.1	Tata Kelola Perseroan	71
9.2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	72
9.3	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	75
9.4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.....	77
9.5	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Audit dalam memantau dan memastikan efektivitas system pengendalian internal	79
9.6	Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal	83
9.7	Penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, Dan Tata Kelola Teknologi Informasi	90
9.8	Penerapan Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai	91
9.9	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Lembaga Penjamin	94
9.10	Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.....	94
9.11	Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat	95
BAB X	BAB X LAPORAN <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> (CSR).....	100
BAB XI	LAPORAN AUDIT	105
11.1	Surat Pernyataan Manajemen.....	105
11.2	Laporan Auditor Independen.....	106
11.3	Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2018-2019	108

LAPORAN MANAJEMEN



LAPORAN MANAJEMEN

A. Laporan Dewan Komisaris



Dewan Komisaris sebagai organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Dewan Komisaris (Dekom) perlu melaporkan pelaksanaan tugas sepanjang tahun 2019 yang akan diuraikan dalam beberapa bagian, yakni: kinerja perseroan; *governance, risk, & compliance*; pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi; serta Komisaris Independen & Komite Audit.

KINERJA PERSEROAN

Dewan Komisaris sangat menghargai Direksi yang telah memberikan upaya terbaik dan melakukan tugas pengelolaan Perseroan dengan baik, walaupun capaian kinerja tahun 2018 kurang menguntungkan dibandingkan tahun sebelumnya dan di bawah target yang sudah ditetapkan. Dalam dunia usaha, kadang kala terjadi situasi kompetisi yang menghadapkan sebuah perusahaan pada faktor eksternal yang belum mampu dikendalikan atau dilewati, sehingga perlu menjadi pertimbangan dalam menilai kinerja perusahaan tersebut.

Capaian kinerja operasional tahun 2018 diwarnai oleh dua hal yang capaiannya berbanding terbalik, yakni volume penjaminan yang tidak mencapai target dan beban klaim yang jauh melebihi anggaran. Dengan kata lain, dalam kondisi Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang tidak memenuhi target, Perusahaan

harus membayar klaim dalam jumlah yang besar. Jumlah klaim yang dibayar Perseroan sebesar Rp22,49 miliar atau 140,56% dari rencana dalam RKAP yang menganggarkan sebesar Rp16 miliar.

Namun, dampak kinerja operasional yang kurang menguntungkan tersebut terhadap keuangan dapat sedikit diredam karena penjaminan tahun-tahun sebelumnya cukup baik dan pendapatan IJP-nya dapat diakui pada tahun 2018 ditambah realisasi pelunasan yang diperoleh atas piutang subrogasi sangat baik. Secara keseluruhan Pendapatan IJP yang diakui dalam laporan keuangan Perseroan mencapai sebesar Rp35,20 miliar atau 96,81% dari target Rp36,36 miliar, sedangkan pendapatan subrogasi dapat diperoleh sebesar Rp3,23 miliar atau 258,53% dari target Rp831,83 juta.

Direksi juga mampu mengendalikan biaya usaha sesuai anggaran yang tersedia. Dalam tahun 2018, realisasi Biaya Usaha yang terdiri dari: Biaya Operasional, Biaya SDM, dan Biaya Administrasi dan Umum hanya sebesar 89,26% dari anggaran yang tersedia.

Perkembangan Unit Penjaminan Syariah dalam tahun 2018 cukup baik. Namun, kontribusi Pendapatan Imbal Jasa Kafalah baru sekitar 9,63% dari total Pendapatan IJP, sehingga masih sangat perlu ditingkatkan terus di masa yang akan datang.

Di tengah suasana persaingan usaha yang semakin ketat, Perseroan berhasil membukukan Laba Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp1,33 miliar pada tahun 2018. Capaian tersebut kurang menguntungkan dibandingkan laba pada tahun 2017 dan dibawah target yang ditetapkan. Namun, Perseroan tetap berpotensi memberikan dividen kepada Pemegang Saham sesuai rasio alokasi penggunaan laba yang biasa berlaku bagi Perseroan.

TATA KELOLA, PENGELOLAAN RISIKO DAN KEPATUHAN (*GOVERNANCE, RISK, & COMPLIANCE*)

Dewan Komisaris berpandangan bahwa Direksi telah berupaya mengimplementasikan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) dalam pengurusan Perseroan. Sejalan dengan GCG, pengelolaan risiko juga cukup mendapat perhatian dan dilakukan secara cukup memadai dalam proses bisnis, walaupun upaya menuju pengelolaan risiko yang lebih handal masih perlu dilakukan.

Dewan Komisaris juga berpandangan bahwa aspek ketaatan dalam pengurusan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku cukup baik termasuk pada ketentuan internal yang berlaku di Perseroan. Dalam hal ini, hasil-hasil pemeriksaan oleh pihak-pihak eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kantor Akuntan Publik tidak melaporkan adanya penyimpangan yang signifikan dan kecurangan.

PENGAWASAN DAN PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Dewan Komisaris memantau, mencermati, membahas, dan menyampaikan pandangan serta saran terhadap langkah-langkah pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mendasarkan pada laporan-laporan yang disampaikan oleh Direksi atau pun data yang diperoleh Dewan Komisaris melalui permintaan kepada Direksi. Forumnya dalam pertemuan bulanan Dewan Komisaris dan Direksi atau pada waktu-waktu tertentu sesuai kebutuhan atau permintaan Dewan Komisaris atau Direksi. Selanjutnya, secara berkala Dewan Komisaris melaporkan tugas pengawasannya kepada pemegang saham melalui Laporan Triwulanan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

Direksi dan jajaran Manajemen Perusahaan telah memberikan kerjasama yang baik dan tidak ditemukan hal-hal yang menghambat pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris. Dengan kerjasama tersebut, telah terselenggara setidaknya 10 kali pertemuan berkala yang melibatkan Direksi.

Secara ringkas, beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dalam pengawasan Dewan Komisaris dan dibahas dengan Direksi dalam tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Langkah-langkah mengatasi tidak tercapainya volume penjaminan pada beberapa produk penjaminan dengan mitra utama, yakni PT Bank Jabar Banten (BJB) tidak terealisasi sesuai target yang mulai dialami sejak triwulan I;
2. Rencana tindakan untuk mengatasi beban klaim yang meningkat terutama sejak akhir triwulan II.
3. Penagihan piutang subrogasi dan investasi dalam aset properti;
4. Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi untuk menunjang proses bisnis penjaminan, pelaporan dan upaya efisiensi;
5. Pengelolaan risiko dan ketataatan terhadap SOP dalam kegiatan penjaminan dan investasi;
6. Portofolio investasi dan upaya peningkatan pendapatan investasi;
7. Pemenuhan terhadap ketentuan tata kelola sesuai POJK;
8. Kapasitas penjaminan (*gearing ratio*) dan kebutuhan penambahan modal;
9. Upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan yang berkelanjutan;
10. Langkah-langkah peningkatan volume penjaminan syariah;
11. Penyusunan RKAP tahun 2019.

KOMISARIS INDEPENDEN & KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dewan Komisaris Perseroan belum memiliki Komisaris Independen dan Komite Audit dalam tahun 2018. Tetapi, sesuai POJK yang berlaku, Perseroan wajib mengadakan kedua posisi tersebut pada tanggal 11 Januari 2019.

PENUTUP

Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham yang telah memberikan kepercayaan dan dukungannya, sehingga PT Jamkrida Jabar tetap dapat berkarya untuk membantu para pengusaha mikro, kecil dan menengah. Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direksi dan seluruh karyawan yang telah bekerja keras dengan penuh kesungguhan dan integritas untuk menjadikan PT Jamkrida Jabar tetap pada jalurnya menuju pencapaian visi dan misi.

Bandung, Mei 2020

Atas nama Dewan Komisaris



Rodhiallah

Komisaris Utama
PT Jamkrida Jabar

B. Laporan Dewan Pengawas Syariah

Sebagai perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam merealisasikan fatwa yang telah diputuskan oleh DSN-MUI yaitu Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah dan Fatwa DSN-MUI No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah, Dewan Pengawas Syariah berperan sebagai pengawas di dalam Perusahaan Penjaminan Syariah ataupun Perusahaan Penjaminan yang melakukan sebagian usaha Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah (UUS) seperti PT Jamkrida Jabar.

Dalam kesempatan ini, patut kiranya saya atas nama Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengucapkan selamat kepada manajemen dan seluruh karyawan PT Jamkrida Jabar atas capaian kinerja yang cukup baik. DPS turut bersyukur bahwa di tengah penyesuaian berbagai kebijakan dan persaingan yang cukup ketat, Perseroan masih mampu menjaga kinerja penjaminannya pada kategori positif walaupun terdapat penurunan.

PENGAWASAN DI TAHUN 2018

Selama tahun 2018, DPS telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, DPS terlibat dalam serangkaian kegiatan rapat baik rapat internal, rapat dengan Direksi atau dengan jajaran di bawah Direksi, atau rapat dengan Dewan Komisaris.

DPS juga telah melakukan *review* atas suatu kebijakan atau SOP yang telah/akan ditetapkan dengan memberikan opini atau rekomendasi berdasarkan ketentuan Syariah serta melakukan *review* atas pelaksanaan produk penjaminan syariah maupun pelayanan yang diberikan kepada mitra dengan cara mengambil uji petik transaksi sebagai bahan penilaian dan memberikan rekomendasi-rekomendasi berdasarkan ketentuan syariah.



Kegiatan pengawasan yang dilakukan DPS PT Jamkrida Jabar selama tahun 2018 antara lain mencakup:

1. Mewakili dan/atau mendampingi Perseroan untuk rapat, diskusi dan konsultasi kepada pihak eksternal terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
2. Rapat dan diskusi dengan pihak internal terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
3. Menilai secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap pelaksanaan penjaminan syariah.
4. Mengawasi proses pengembangan produk baru atau fitur produk yang dituangkan dalam ketentuan internal atau SOP agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari Satuan Pengawas Internal (SPI) Perseroan dalam melaksanakan tugasnya.
6. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah serta menyampaikan hasil evaluasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan DSN-MUI dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan DPS.

Berdasarkan hasil pengawasan selama tahun 2018, DPS menyampaikan bahwa secara umum operasional Unit Usaha Syariah (UUS) PT Jamkrida Jabar telah sesuai dengan prinsip syariah, fatwa DSN-MUI, dan opini DPS. Kesalahan/kekurangan yang terjadi pada kegiatan operasional dikarenakan perbedaan pemahaman individu atas suatu produk dan pedoman operasional penjaminan oleh UUS. Atas kesalahan/kekurangan tersebut, DPS merekomendasikan agar segera dilakukan perbaikan-perbaikan setelah kesalahan/kekurangan tersebut diketahui. Apabila terdapat unsur kesengajaan sehingga terdapat prinsip syariah yang tidak terpenuhi, maka terhadap kesalahan/kekurangan yang disengaja tersebut harus ada konsekuensi.

Pemenuhan prinsip syariah memang tidak mudah, dan juga tidak boleh dianggap sederhana. Hal ini terkait dengan sah atau tidaknya pendapatan yang diperoleh dan penjaminan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya KUMKM di Provinsi Jawa Barat.

Oleh karena itu, seluruh kegiatan operasional UUS harus dipastikan berjalan sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku bagi UUS. Insya Allah dengan kesadaran dan komitmen yang kuat maka kualitas UUS PT Jamkrida Jabar akan semakin baik pada tahun-tahun yang akan datang.

Dengan kerja sama yang baik dari Direksi dan segenap karyawan PT Jamkrida Jabar, semua kegiatan baik pada aspek pengembangan produk baru hingga kegiatan operasional penjaminan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang berlaku di UUS PT Jamkrida Jabar.

Sebagaimana diketahui, bahwa DPS menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi pelaksanaan dan pengembangan produk penjaminan yang dimiliki oleh UUS PT Jamkrida Jabar. Kajian telah dilakukan terhadap pemenuhan prinsip syariah terutama dalam hal kesesuaian atau adanya ketidaksesuaian serta ada dan tidaknya rujukan fatwa. Seluruh aktivitas DPS tersebut juga telah didokumentasikan dan dilaporkan kepada OJK dan DSN-MUI dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan DPS.

HARAPAN DI TAHUN 2020

Menyongsong tahun 2020, DPS berharap agar UUS PT Jamkrida Jabar dapat terus menjaga bahkan meningkatkan kinerjanya semaksimal dan sebaik mungkin dengan tetap menjaga pemenuhan prinsip kehati-hatian dan syariah dalam menjalankan kegiatan operasional penjaminannya. DPS bersyukur bahwa komunikasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun Divisi tetap terjaga dengan baik.

Sinergi yang telah dibangun melalui rapat-rapat dengan Dewan Komisaris, Direksi maupun Divisi agar senantiasa dijaga dan terus ditingkatkan dalam rangka menjaga kualitas kegiatan operasional penjaminan syariah UUS PT Jamkrida Jabar agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar prinsip syariah.

APRESIASI

Sekali lagi DPS turut bersyukur atas capaian kinerja UUS PT Jamkrida Jabar yang positif di tahun ini. Pada kesempatan ini DPS juga senantiasa mengingatkan manajemen PT Jamkrida Jabar, khususnya Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar, agar tetap berkomitmen untuk menjaga pemenuhan prinsip-prinsip syariah serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhir kata, DPS berharap agar UUS PT Jamkrida Jabar dapat mewujudkan visi PT Jamkrida Jabar menjadi perusahaan penjaminan kredit terpercaya yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam hal penjaminan kredit syariah.

Bandung, Mei 2019

Atas nama Dewan Pengawas Syariah



Zaini Abdul Malik

Ketua Dewan Pengawas Syariah

PT Jamkrida Jabar

C. Laporan Direksi



Februari 2019.

KONDISI EKONOMI TAHUN 2018

Tahun 2018 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi perkembangan perseroan. Hal ini dikarenakan tahun tersebut adalah tahun politik dimana Provinsi Jawa Barat berikut beberapa kota dan kabupatennya menjadi bagian dari wilayah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Selain itu, di penghujung akhir 2018 juga dimulai tahapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2019. Kedua momentum politik tersebut tentu saja berpengaruh pada kondisi bisnis secara umum, tak terkecuali bagi Perseroan.

Namun demikian kondisi kinerja perekonomian Jawa Barat secara umum masih cukup kondusif. Pertumbuhan ekonomi berada pada level 5,64% (yoy) tahun 2018, pencapaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 5,35% (yoy). Sektor-sektor yang menyumbang pertumbuhan ekonomi Jawa Barat berasal dari konsumsi rumah tangga, meningkatnya kinerja industri pengolahan dan konstruksi. Selain itu, pelaksanaan Pilkada Serentak dan Pilgub Jawa Barat telah mendorong peningkatan konsumsi masyarakat dan peningkatan kinerja industri. Adapun faktor utama pendorong kinerja konstruksi berasal dari penyelesaian pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). *Sumber: KEKR Provinsi Jawa Barat*

PENCAPAIAN DIBANDINGKAN DENGAN TARGET DAN HASIL TAHUN SEBELUMNYA

Dengan dukungan yang kuat dari Dewan Komisaris dan pemegang saham dalam membentuk dan meninjau strategi Perseroan sepanjang tahun, serta penyesuaian diri terhadap lingkungan operasional yang

penuh tantangan dan senantiasa dekat dengan mitra, kami dapat mewujudkan komitmen untuk menciptakan kinerja yang positif serta tumbuh secara kompetitif.

Laba bersih Perseroan (konsolidasi) pada tahun 2018 adalah senilai Rp1,33 miliar, turun sebesar 62,23% dibandingkan dengan laba dari tahun sebelumnya, atau hanya 45,73% dibandingkan dengan target yang termuat dalam RKAP 2018. Penurunan Laba bersih atau tidak tercapainya target Laba Bersih Perseroan tersebut diantaranya disebabkan oleh pencapaian kinerja penjaminan yang menurun sebesar 1,85% jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena persaingan bisnis di salah satu mitra yang demikian ketat yang belum mampu diatasi oleh Perseroan pada saat itu sehingga mengakibatkan *share* penjaminan yang diperoleh Perseroan hanya tersisa sekitar 10% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Disamping itu, nilai klaim yang *over budget* (meningkat lebih dari 40%) ikut berkontribusi terhadap tidak tercapainya kinerja usaha tahun 2018. Dan sebagai dampak ikutannya adalah nilai aset di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 2,15% dibandingkan nilai aset pada tahun 2017, yakni dari Rp271,18 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp265,34 miliar pada tahun 2018.

Adapun Unit Usaha Syariah, kinerja penjaminannya tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 26,69% dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2017. Sedangkan pendapatan usahanya tumbuh 58,87%, dan nilai klaimnya naik 42,58% atau senilai dengan Rp1,89 miliar.

Secara keseluruhan, meskipun situasi dan kondisi tahun 2018 tidak sesuai dengan harapan, namun *alhamdulillah* Perseroan masih bias menghasilkan Laba Bersih sebesar Rp1,33 miliar. Hal ini tentunya tidak bias dilepaskan dari kontribusi dari para pemangku kepentingan, termasuk jajaran pengurus, manajemen dan karyawan PT Jamkrida Jabar.

TANTANGAN

Tantangan utama bagi industri penjaminan di tahun 2018 adalah pertumbuhan makro ekonomi yang tidak stabil yang diakibatkan oleh banyak faktor. Tentunya hal ini berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap bisnis penjaminan secara umum.

PELAKSANAAN STRATEGIS

Untuk mengantisipasi tantangan diatas, strategis Perseroan di tahun 2019 adalah menciptakan nilai lebih bagi konsumen dan pada saat yang bersamaan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan menguntungkan dengan tetap mengacu pada aspek-aspek tata kelola perusahaan yang baik serta nilai-nilai perusahaan. Untuk mencapai sasaran tersebut, Perseroan berfokus pada lima strategi, yaitu:

1. Ekspansi bisnis berbasis risiko dan profit
2. Investasi berbasis Resiprokal
3. Optimalisasi subrogasi
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
5. *Update* Sistem Informasi

PEMERINGKATAN

Kinerja Perseroan selama tahun 2019 menurut penilaian Perusahaan Pemeringkat Efek dengan kategori *idBBB (stable outlook)*, artinya Perseroan memiliki kemampuan yang memadai dibanding Perusahaan Indonesia lainnya untuk memenuhi komitmen keuangannya. Dengan hasil tersebut, Perseroan telah melampaui standar minimal untuk dapat bekerja sama dengan bank-bank umum.

PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

Sebagai Perusahaan Penjaminan yang merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat, Perseroan menyadari bahwa dalam mengelola dana masyarakat adalah penting untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). Hal ini sesuai dengan arahan OJK yang sekaligus juga menjadi bagian dari tuntutan kebutuhan di lingkungan industri keuangan Indonesia.

Sejak tahun 2017, Perseroan telah menyusun berbagai pedoman pelaksanaan GCG diantaranya adalah:

1. *Code of Corporate Governance* (Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)
2. *Board of Manual* (Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi)
3. *Code of Conduct* (Etika Kerja dan Etika Usaha)
4. *Internal Audit Charter* (Piagam Internal Audit)
5. *Committee Audit Charter* (Piagam Komite Audit)
6. *Code of Whistleblowing Systems* (Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran)

7. Pedoman Keterbukaan Informasi Publik

Tahun 2019 adalah tahun ketiga Perseroan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) berdasarkan pada format yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun skor *self assessment* tahun 2019 adalah 79,72 dengan kategori “Sangat Sehat”. Secara nilai, pencapaian tahun 2019 meningkat dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 dengan nilai 78,57, hal ini menggambarkan bahwa implementasi GCG di PT Jamkrida Jabar mengalami perbaikan dan peningkatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini izinkan kami menghaturkan terima kasih kepada segenap pemangku kepentingan PT Jamkrida Jabar yang terus menunjang dan mendukung perkembangan Perseroan selama ini. Tuntutan pertumbuhan dan perkembangan Perseroan yang harus dilakukan di masa-masa mendatang akan dapat terpenuhi dengan lebih baik jika dilakukan secara bersama-sama dan dalam sebuah kerjasama yang baik.

Ini semua tentunya adalah demi satu tujuan yakni agar visi Perseroan, “Menjadi Perusahaan Penjamin Kredit Terpercaya yang Berkontribusi pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, dapat direalisasikan dengan perbaikan yang berkelanjutan.

Bandung, Juni 2020

Atas nama Direksi,



Tri Budhi Muljawan

Direktur Utama

PT Jamkrida Jabar

D. Tanggung Jawab Pelaporan Tahunan

Laporan Tahunan berikut Laporan Keuangan dan informasi lain yang terkait dibuat dengan keadaan sebenarnya oleh Direksi yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris dengan membubuhkan tanda tangan di bawah ini.

DEWAN KOMISARIS

PT Jamkrida Jabar

**Rodhiallah**

Komisaris Utama

**Syafrial Firdaus**

Komisaris

DIREKSI

PT Jamkrida Jabar

**Tri Budhi Muljawan**

Direktur Utama

**Budi Setyono**

Direktur Keuangan

**Asep Gunawan Sirad**

Direktur Operasional

KILAS KINERJA PERSEROAN



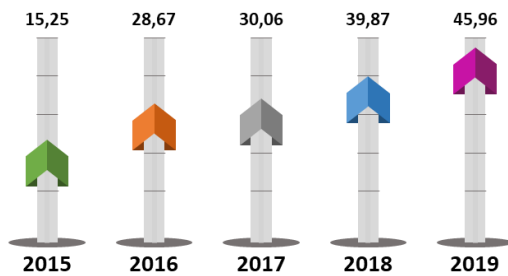
BAB I

KILAS KINERJA PERSEROAN

1.1 Ikhtisar Kinerja

IMBAL JASA PENJAMINAN (ACCRUAL)

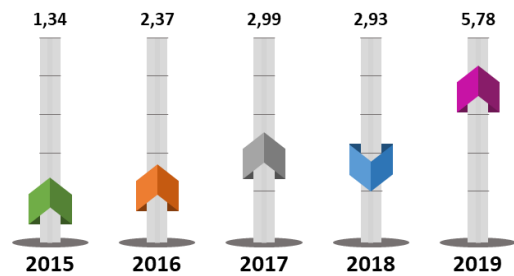
dalam Miliaran Rupiah



Note : Setelah dikurangi Restitusi

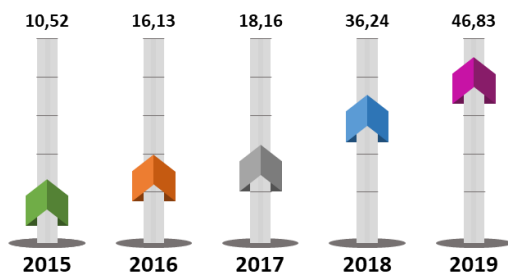
VOLUME PENJAMINAN

dalam Triliunan Rupiah



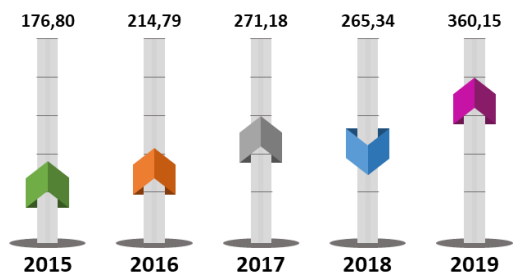
JUMLAH KUMKM TERJAMIN

dalam Ribuan Orang/Unit



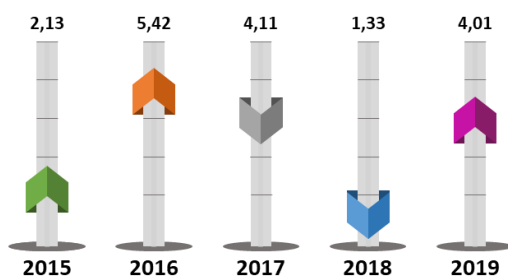
TOTAL ASET

dalam Miliaran Rupiah



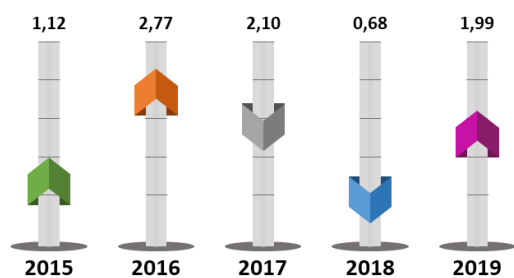
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN

dalam Miliaran Rupiah

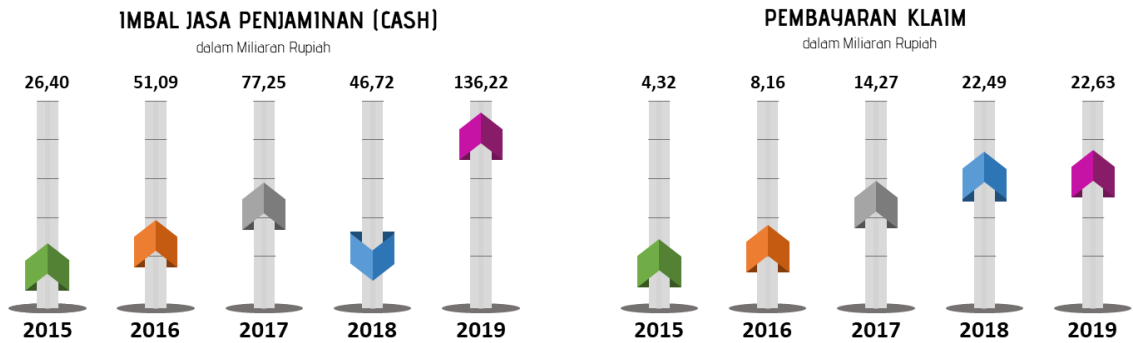


PEMBAYARAN DIVIDEN

dalam Miliaran Rupiah



Note : *Asumsi besarnya persentase dividen atas laba bersih sama dengan periode sebelumnya



1.2 Ikhtisar Keuangan

PT JAMKRIDA JABAR LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

dalam jutaan rupiah

	2018 (AUDITED)	RKAP 2019	2019 (AUDITED)	CAPAIAN 2019	GROWTH 2018-2019
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan Setara Kas	139.780,66	193.050,80	171.333,69	88,75%	22,57%
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	8.659,87	2.671,73	4.544,90	170,11%	-47,52%
Beban Dibayar Dimuka	11.768,54	28.870,83	18.522,77	64,16%	57,39%
Aset Keuangan	2.000,00	2.000,00	35.092,00	1754,60%	1654,60%
Properti Investasi	2.445,00	2.445,00	2.472,00	101,10%	1,10%
JUMLAH ASET LANCAR	164.654,08	229.038,36	231.965,36	101,28%	40,88%
ASET TETAP					
Aset Tetap	12.246,52	11.450,75	11.699,14	102,17%	-4,47%
JUMLAH ASET TETAP	12.246,52	11.450,75	11.699,14	102,17%	-4,47%
ASET TIDAK LANCAR					
Beban Dibayar Dimuka - Jangka Panjang	40.751,57	56.708,94	94.168,00	166,05%	131,08%
Aset Keuangan - Jangka Panjang	40.117,68	44.055,00	14.071,25	31,94%	-64,93%
Aset Pajak Tangguhan	6.856,02	6.393,22	7.270,57	113,72%	6,05%
Aset Lain-lain	717,05	278,82	974,84	349,62%	35,95%
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	88.442,33	107.435,98	116.484,65	108,42%	31,71%
JUMLAH ASET	265.342,93	347.925,09	360.149,16	103,51%	35,73%
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang Pajak	275,36	370,49	383,57	103,53%	39,30%
Utang Re/Cogaransi	3.289,61	4.758,63	4.572,29	96,08%	38,99%
Beban Yang Masih Harus Dibayar	1.267,54	-	898,40	-	-29,12%
Penampungan Sementara	3.048,70	760,73	4.008,55	526,94%	31,48%
Utang Lancar Lainnya	65,47	1.092,62	12,89	1,18%	-80,31%
Pendapatan Diterima Dimuka - Jangka Pendek	23.943,19	45.079,55	32.073,36	71,15%	33,96%
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	31.889,88	52.062,01	41.949,07	80,58%	31,54%

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

dalam jutaan rupiah

	2018 (AUDITED)	RKAP 2019	2019 (AUDITED)	CAPAAN 2019	GROWTH 2018-2019
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Pendapatan Diterima Dimuka - Jangka Panjang	70.909,00	133.626,15	151.295,08	113,22%	113,37%
Cadangan Klaim	3.192,04	5.009,48	4.050,46	80,86%	26,89%
Liabilitas Imbalan Paska Kerja	1.266,83	-	1.776,03		40,19%
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	75.367,87	138.635,64	157.121,57	113,33%	108,47%
JUMLAH LIABILITAS	107.257,75	190.697,65	199.070,65	104,39%	85,60%
EKUITAS					
Modal	153.200,00	153.200,00	153.200,00	100,00%	0,00%
Cadangan Umum	3.761,25	9,67	4.094,65	42329,63%	8,86%
Saldo Laba (Rugi)	1.333,59	4.017,77	3.907,91	97,27%	193,04%
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga	(66,00)	-	87,16		-232,05%
Keuntungan (Kerugian) Pengukuran Kembali Imbalan Pasti Setelah Aset Pajak Tangguhan	(143,66)	-	(211,20)		47,01%
JUMLAH EKUITAS	158.085,18	157.227,44	161.078,51	102,45%	1,89%
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	265.342,93	347.925,09	360.149,16	103,51%	35,73%

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

dalam jutaan rupiah

	2018 (AUDITED)	RKAP 2019	2019 (AUDITED)	CAPAAN 2019	GROWTH 2018-2019
PENDAPATAN PENJAMINAN					
Imbal Jasa Penjaminan	41.301,95	51.627,45	47.732,91	92,46%	15,57%
Beban Akuisisi	(5.414,68)	(5.998,02)	(6.835,63)	113,96%	26,24%
Restitusi IJP	(1.434,28)	-	(1.773,30)		23,64%
Manajemen Fee	744,03	4.766,44	3.219,84	67,55%	332,75%
JUMLAH PENDAPATAN PENJAMINAN	35.197,02	50.395,87	42.343,82	84,02%	20,31%
BEBAN KLAIM					
Beban Klaim	(22.490,35)	(24.748,25)	(22.636,37)	91,47%	0,65%
Beban (Pemulihan) Cadangan Klaim	265,77	(2.504,74)	(858,42)	34,27%	-423,00%
Beban Regaransi	(11.580,81)	(13.144,04)	(14.268,88)	108,56%	23,21%
JUMLAH BEBAN KLAIM	(33.805,38)	(40.397,03)	(37.763,68)	93,48%	11,71%
PENDAPATAN PENJAMINAN BERSIH	1.391,63	9.998,84	4.580,13	45,81%	229,12%
PENDAPATAN INVESTASI	13.359,58	14.817,99	14.935,39	100,79%	11,80%
PENDAPATAN SUBROGASI	3.231,63	999,81	3.218,32	321,89%	-0,41%
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	(1.649,13)	(2.741,24)	(2.379,18)	86,79%	44,27%
BEBAN USAHA	(15.501,98)	(19.057,62)	(16.838,79)	88,36%	8,62%
LABA SEBELUM PAJAK	831,73	4.017,77	3.515,88	87,51%	322,72%
BEBAN PAJAK PENGHASILAN					
Beban Pajak Kini	-	-	-		
Manfaat Pajak tangguhan	501,86	-	392,04		-21,88%
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN	501,86	-	392,04		-21,88%
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	1.333,59	4.017,77	3.907,91	97,27%	193,04%
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	117,19	-	(67,54)		-157,64%
LABA KOMPREHENSIF	1.450,78	4.017,77	3.840,37	95,58%	164,71%

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

1.3 Ikhtisar Operasional

IKHTISAR KINERJA OPERASIONAL PT JAMKRIDA JABAR TAHUN 2019					
	RKAP 2019	REALISASI 2019	REALISASI 2018	CAPAIAN 2019	GROWTH 2018-2019
1. LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN (dalam Jutaan Rupiah)	4.017,77	3.907,91	1.333,59	97,27%	193,04%
2. TOTAL ASET (dalam Jutaan Rupiah)	347.925,09	360.149,16	265.342,93	103,51%	35,73%
3. VOLUME KREDIT (dalam Jutaan Rupiah)	5.684.797,90	6.084.471,31	3.253.426,27	107,03%	87,02%
4. VOLUME PENJAMINAN (dalam Jutaan Rupiah)	5.196.430,13	5.783.496,67	2.929.902,57	111,30%	97,40%
5. IMBAL JASA PENJAMINAN (ACCRUAL) (dalam Jutaan Rupiah)*)	51.627,45	45.959,61	39.867,67	89,02%	15,28%
6. GEARING RATIO (dalam satuan kali)	35,08	27,11	19,67	77,28%	37,82%
7. KLAIM (dalam Jutaan Rupiah)	24.748,25	22.636,37	22.490,35	91,47%	0,65%
8. SUBROGASI (dalam Jutaan Rupiah)	999,81	3.218,32	3.231,63	321,89%	-0,41%
9. PENDAPATAN INVESTASI (dalam Jutaan Rupiah)	14.817,99	14.935,39	13.359,58	100,79%	11,80%
10. KUMKM TERJAMIN (dalam satuan unit/orang)	46.554	46.832	39.061	100,60%	19,89%

1.4 Peristiwa Penting PT Jamkrida Jabar



21 Januari 2019
Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Provinsi
Kalimantan Selatan



15 Februari 2019
Perjanjian Kerjasama dengan BPRS Amanah
Rabbaniah



06 Maret 2019
Perjanjian Kerjasama Kogaransi antar Jamkrida



02 April 2019
Kunjungan Kerja Dinas KUMKM Provinsi Jambi



15-16 April 2019
In-House Training dan Inklusi Keuangan
PT Jamkrida Jabar



13 Mei 2019
Buka bersama Anak Yatim



17 Mei 2019
Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Provinsi Banten



18 Juni 2019
Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2018



26-28 Juli 2019
Expo Koperasi Syariah



02 Agustus 2019
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penjaminan dengan PD BPR Cianjur Jabar



15 Oktober 2019
Sinergitas BUMD Jabar



22 Oktober 2019
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penjaminan dengan PT BPR Brata Nusantara



25 Oktober 2019

Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Provinsi Banten



21 November 2019

Employee Gathering PT Jamkrida Jabar



26 November 2019

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Jamkrida Jabar



20 Desember 2019

Penandatanganan PKS dengan BPR dan BPRS
Jawa Barat dan Jawa Tengah



PERSEROAN

BAB II

PROFIL PERSEROAN

2.1 Sekilas Perseroan

PT Jamkrida Jabar merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat dengan tujuan melaksanakan dan menunjang kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dengan jalan melakukan kegiatan Penjaminan Kredit, serta bantuan Manajemen dan Konsultasi.



PT Jamkrida Jabar didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas No. 03 tanggal 3 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Yuliani Idawati, S.H., Sp.N., Notaris yang berkedudukan di Kota Bandung dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-56159.AH.01.01 tanggal 1 November 2012.

Dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Kredit di Daerah Jawa Barat, PT Jamkrida Jabar mendapatkan Izin Operasional Nomor KEP.05/D.05/2013 tanggal 30 Januari 2013 dari Otoritas Jasa Keuangan yang pada saat itu baru beralih dari Bapepam LK. Perseroan juga telah mendapatkan pemeringkatan "idBBB" dari lembaga pemeringkatan PT Pefindo sehingga dapat bekerja sama

dengan pihak perbankan sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/6/DPNP tahun 2011 mengenai Aset Tertimbang Menurut Risiko.

2.2 Filosofi Logo Perseroan

Logo Perusahaan menunjukkan identitas bisnis dari suatu Perusahaan. Selain itu, logo Perusahaan juga menunjukkan nilai yang dibawa oleh Perusahaan tersebut. Berikut ini filosofi logo PT Jamkrida Jabar:

Logomark



Langgam simbol *double* huruf simetri 'JJ', digambarkan bagaikan dua bilah kujang kembar dipersandingkan tersusun secara simetri dengan saling membelakangi. Sosok ini mengingatkan kepada siluet postur berdiri badan manusia. Langgam logo ini mengisyaratkan kemandirian. Bulatan rembulan di ujung garis simetri berlaku sebagai penerang purnama dan penyejuk semangat matahari kujang.

Ragam 'Kujang' berdiri merupakan simbol kamandungan tali ari-ari tempat janin bermuasal. Tertransformasikan menuju susunan huruf 'J'. Makna Kujang berdiri dijadikan simbol keselarasan pandangan ajaran Sunda wiwitan penjaga keselarasan alam. Selain sebagai alat pertanian yakni 'ketam memanen padi' juga sebagai pusaka pamor simbol semangat pemersatu. Kujang merupakan simbol ketajaman bertuah pamor kepribadian *local wisdom* kekhasan keluhuran watak pedusunan Sunda yang masih dilestarikan. 'Silih Asih Silih Asah Silih Asuh Silih Wewangian Sak Uyunan Silih Simbutan', sebuah aspirasi sikap kesahajaan keluhuran budi bahasa masyarakat Sunda mencerminkan kekokohan terjalannya ikatan kekerabatan. Sebagai pedoman keselarasan kesahajaan saling berdampingan bersama sebagai bekal lumbung peningkatan kehidupan masa depan generasi selanjutnya.

Bingkai Kotak sebagai lingkup akhir susunan logo, mengisyaratkan makna sebuah keutuhan tetap dan baku, kuat tidak tergoyahkan dan stabil. Memberikan gambaran stabilitas tatanan ekonomi mengantarkan swadaya kemandirian penghidupan bermartabat masyarakat Jawa Barat. Geometri 'Kotak' merupakan perlambang pijakan punden berundak sebagai simbol kemanunggalan semesta. Kotak menggambarkan puncak kematangan kepribadian. Dan sebagai simbol Tridharma, 'Vasthu

Purusha Mandala' jalan menuju keagungan sebagai simbol pusat meditasi menuju pematangan berkepribadian.

Warna Logo



Warna Biru



Warna Hijau

Warna standar Logo PT Jamkrida Jabar adalah warna biru dan hijau. Adapun makna dari warna-warna pada logo PT Jamkrida Jabar adalah sebagai berikut:

Hamparan pusara pasundan dikenal sebagai wilayah parahiyangan dengan keelokan rindangnya tanah subur diliput oleh deretan permai hawa pegunungan yang subur gemah ripah. Warna pelingkup dua alam sebagai pijakan inspirasi dasar Logo utama dengan latar belakang layar parahu berwarna 'Hijau' dan 'Biru'. Terletak bersanding berdampingan sebagai penyeimbang simetri keselarasan alam terbentang. Keseimbangan antara kemauan dan kemampuan dalam mengolah terpeliharanya seluruh khasanah kekayaan alam sebagai sumber kehidupan bermartabat dimasa depan.

Makna warna 'Hijau' mengisyaratkan keteduhan hutan hijau menaungi kesuburan bentang permadani ladang dan kebun. Dan warna 'Biru' mensimbolkan makna keabadian sumber kehidupan mata air sebagai jembatan samudera (Cukang Sagara). Dua warna 'Hijau Biru' bertaut menyatukan sebagai penaung terjaganya kemajuan selaras penyeimbang ekologi alam daratan, pegunungan dan lautan sebagai pusara keselarasan. Kecerdasan astronomi dan ilmu kelautan, menunjang kearifan masyarakat pasundan melaksanakan kebijakan air samudera. Warna 'Hijau' (Hyang Jawa = Payung Teduh) melambangkan keteduhan jiwa dan pengayoman. Warna 'Biru' (Umbi Ruh = Ibu Ruh) melambangkan pusara ruh keluhuran, kecerdasan dan kebijaksanaan.

Dwi Warna 'Hijau Biru' memberikan pertautan makna Hyang Jawa Umbi Ruh = Payung keteduhan naungan Ibu Ruh, transformasi pertautan membentuk keseimbangan baru yang saling menghidupkan. Ajaran Umbi (Dewi Pohachi), merupakan pokok ajaran keseimbangan tatar tua Pasundan Sumbhi Prabangkara sebagai pengayom menuju jalan keyakinan tempat bermuasal melalui tutur lisan (kidung) masyarakat adat. 'Gemah Ripah Loh Jinawi Tata Tentrem Kertaraharja'.

Arti makna Simbol Keseluruhan

Secara keseluruhan, logo PT Jamkrida Jabar memiliki makna yaitu Mengantarkan tubuh kehidupan mencapai kemandirian bermartabat untuk menjaga keseimbangan keselarasan alam, tetap terjaga keutuhannya mewujudkan generasi masa depan gemilang berpedoman keseimbangan kebijakan alam.

2.3 Tonggak Sejarah

2012 : PENDIRIAN PERSEROAN & INISIASI

- Perseroan didirikan atas dasar pemikiran Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa dalam rangka penguatan permodalan dan memperlancar kegiatan dunia usaha, khususnya KUMKM guna membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah usaha, serta membantu mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan, maka diperlukan peningkatan akses KUMKM pada sumber pembiayaan.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan KUMKM, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi dan mendorong pengembangan lembaga penjaminan kredit di daerah.
- PT Jamkrida Jabar sebagai BUMD yang bergerak di bidang penjaminan kredit dibentuk agar kegiatan usaha lembaga penjaminan kredit di daerah diselenggarakan secara efisien, berkesinambungan, serta bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

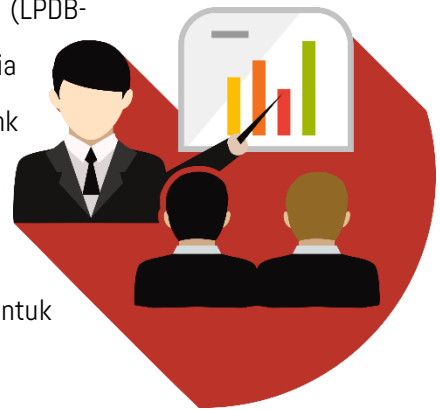


2013 : TAHAP KERJASAMA & REORGANISASI

Dalam rangka mempercepat proses implementasi kerjasama dengan berbagai lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya, PT Jamkrida Jabar melakukan kerjasama dengan mitra-mitra strategis untuk mengembangkan perekonomian Jawa Barat.

Kegiatan usaha dan operasional yang dilakukan antara lain:

- Grand Opening PT Jamkrida Jabar dan Diskusi Panel mengenai kegiatan penjaminan kredit yang dihadiri oleh mitra-mitra strategis;
- Kerjasama dengan Bank BJB untuk Penjaminan Kredit Cinta Rakyat (KCR) dan penerbitan Kontra Garansi Bank;
- Melakukan Penjaminan Kredit Multiguna Bank BJB yang bekerjasama dengan Konsorsium Broker Asuransi (PT Proteksi Antar Nusa, PT Insko Multi Pratama, PT Rama Mitra Jasa, dan PT Brocade);
- Kerjasama dengan Bank Artos untuk Penjaminan Kredit Pola Potong Gaji dan Kredit Konstruksi;
- Kerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia untuk Penjaminan Kredit kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- Kerjasama dengan Koperasi Sauyunan Jawa Barat untuk Penjaminan Kredit Modal Usaha;
- Kerjasama dengan Koperasi Pensiunan Bank BJB untuk Penjaminan Kredit Multiguna;
- Kerjasama dengan beberapa lembaga keuangan lainnya untuk Penjaminan Kredit dengan Pola Potong Gaji;
- Kerjasama dengan Lembaga Pemeringkat (PT Pefindo) dan PT Jamkrida Jabar telah memperoleh Peringkat "idBBB-".
- Pada tahap ini Perseroan melengkapi perangkat organisasi dengan memasukkan unsur Good Corporate Governance (GCG) dan Manajemen Risiko sehingga pelaksanaan penjaminan kredit diharapkan berjalan sesuai dengan Ketentuan Perseroan dan Regulasi dari Pemerintah (compliance).



2014: TAHAP PERTUMBUHAN

Setelah melalui tahun-tahun penuh tantangan dan Perseroan telah memiliki pondasi yang kuat, tahun 2014 merupakan tahun pengembangan dengan capaian laba Rp3,08 miliar, volume kredit

sebesar Rp1,76 triliun, volume penjaminan sebesar Rp670,81 juta dengan jumlah UMKM sebanyak 5.575 UMKM dan dapat menyerap 74.562 tenaga kerja dengan langkah kerja sebagai berikut:

- Memperluas produk penjaminan, seperti penjaminan kredit konstruksi, kredit umum, kredit mikro, dan kredit koppeg/kopkar.
- Perseroan merencanakan membuka Unit Usaha Syariah, hal ini dimungkinkan karena potensi pasar penjaminan syariah di wilayah Jawa Barat sangat besar. Selain itu banyak perbankan syariah atau lembaga keuangan non bank syariah yang meminta untuk bekerjasama dalam hal penjaminan (kafalah).
- Perseroan merencanakan pembelian gedung baru dikarenakan kondisi dan letak gedung yang digunakan saat ini dinilai kurang representatif dan berada di jalur yang rawan macet, serta telah habisnya masa pinjam pakai dari Bank BJB.
- Meningkatkan Tata Kelola Perseroan melalui kegiatan pelatihan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia serta penilaian kinerja berdasarkan analisa jabatan dan Key Performance Indicator.
- Mengurangi atau memperkecil beban risiko yang diterima oleh Perseroan dengan mengalihkan sebagian kepada pihak lain.
- Pembentukan Sistem Informasi Penjaminan Kredit (SISKA) sehingga diharapkan Perseroan dapat menampilkan data outstanding kredit secara up to date khususnya untuk perhitungan gearing ratio, mitigasi risiko, dan business recovery program.



2015: TAHAP EKSPANSI PERSEROAN I

Pada tahun 2015, Perseroan terus mengembangkan sayapnya dalam bisnis penjaminan kredit. Perseroan berkerjasama dengan beberapa mitra baru dan tetap mempererat hubungan bisnis dengan para mitra lama.

Secara umum kinerja Perseroan mengalami peningkatan, namun seiring dengan meningkatnya penjaminan kredit yang dilakukan Perseroan, maka nilai klaim pun semakin meningkat dari Rp931,35 juta pada tahun 2014 menjadi Rp4,31 miliar pada tahun 2015, atau mengalami kenaikan sebesar

373%. Sehingga laba Perseroan mengalami penurunan dari Rp3,08 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp2,13 miliar pada tahun 2015, atau mengalami penurunan sebesar 31%.

Tahun 2015 ini disebut juga sebagai Tahap Ekspansi Perseroan. Beberapa pelebaran usaha telah dilakukan Perseroan dalam mengembangkan bisnisnya, adapun bagian dari Tahap ekspansi Perseroan ini antara lain:

- Keluarnya Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar dari OJK No. KEP-4/NB.223/2015 tanggal 3 Februari 2015. Dengan keluarnya izin dari OJK tersebut maka perseroan dapat memaksimalkan kinerjanya untuk melakukan pembiayaan kafalah dari Lembaga Keuangan Syariah atau Lembaga Non Keuangan Syariah yang potensinya cukup besar di Provinsi Jawa Barat. Adapun *Grand Launching* dari Unit Usaha syariah ini bersamaan dengan *Grand Opening* gedung baru PT Jamkrida Jabar.
- Bersamaan dengan kebutuhan operasional Perseroan yang semakin meningkat dan kebutuhan untuk meningkatkan *brand image* dari Perseroan, maka Perseroan memutuskan untuk membeli gedung baru. Adapun *Grand Opening* dari gedung baru PT Jamkrida Jabar ini adalah pada tanggal 10 September 2015, dan diresmikan langsung oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat.
- Perseroan memutuskan untuk mengembangkan sayapnya dengan melakukan penjaminan diluar wilayah Jawa Barat. Salah satunya adalah kerjasama *co-guarantee* dengan Jamkrida Banten dan broker *Safe Insurance Broker (SIB)*.



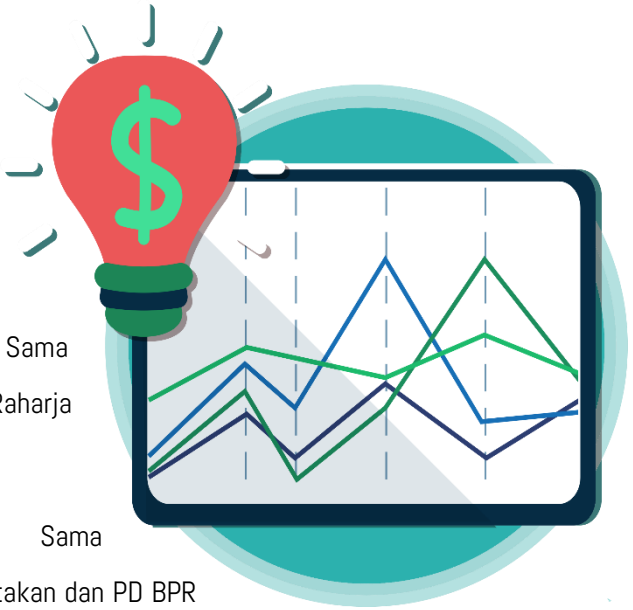
2016: TAHAP EKSPANSI PERSEROAN II

Secara umum, tahun 2016 merupakan tahun yang positif bagi Perseroan, dimana perseroan mendulang laba bersih yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp5,42 miliar atau 213% bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2016 sebesar Rp2,54 miliar. Laba tahun 2016 ini mengalami kenaikan sebesar 154% dibandingkan dengan laba bersih pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp2,13 miliar. Kenaikan Laba pada tahun 2016 ini disebabkan karena adanya peningkatan nilai imbal jasa penjaminan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.



Tahun 2016 merupakan tahun dimana Perseroan melakukan ekspansi bisnis yang cukup lebar, khususnya untuk merambah bisnis penjaminan kredit dengan BPR-BPR. Hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa penandatanganan PKS dengan beberapa mitra baru, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penandatanganan Akad Kerja Sama *Kafalah* Pembiayaan dengan PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan pada tanggal 18 Januari 2016.
2. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penjaminan Kredit dengan PT BPR Kerta Raharja pada tanggal 01 Februari 2016.
3. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penjaminan Kredit dengan PD BPR Kapetakan dan PD BPR Cirebon Selatan pada tanggal 19 Juli 2016.
4. Penandatanganan Akad Kerja Sama *Kafalah* Pembiayaan dengan PT BPRS Al Ma'soem pada tanggal 21 Juli 2016.
5. Penandatanganan Akad Kerja Sama *Kafalah* Pembiayaan dengan PT BPRS Patriot Kota Bekasi pada tanggal 08 September 2016.
6. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penjaminan Kredit dengan PT BPR Bahtera Masyarakat Jawa Barat pada tanggal 03 November 2016.
7. Penandatanganan Akad Kerja Sama *Kafalah* Pembiayaan dengan PT BPRS Harta Insan Karimah Cibitung pada tanggal 11 November 2016.
8. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penjaminan Kredit dengan beberapa Koperasi Pegawai/Koperasi Karyawan (Koppeg/Kopkar) yang mendapat pembiayaan dari Bank Kesejahteraan Ekonomi.



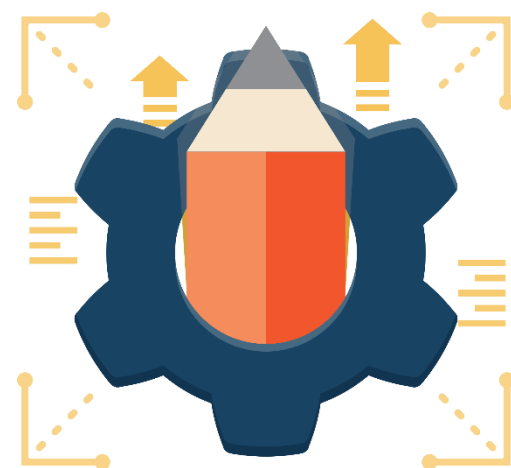
Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar membuka 4 (empat) kerjasama kafalah pembiayaan baru pada tahun 2016, serta membukukan volume kafalah pembiayaan Unit Usaha Syariah sebesar Rp314,02 miliar atau sebesar 717% dari anggaran tahun 2016 sebesar Rp43,76 miliar. Serta pencapaian volume IJK sebesar Rp1,42 miliar atau sebesar 414% dari anggaran tahun 2016 sebesar Rp343,88 juta. Unit Usaha Syariah juga membukukan laba yang Unit Usaha Syariah telah membukukan

laba sebesar Rp369,14 juta. Hal ini merupakan sebuah pencapaian yang positif bagi sebuah unit usaha yang baru beroperasi dua tahun.

Dengan modal awal pendirian sebesar Rp15 miliar, total aset yang dimiliki oleh Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp19,25 miliar. Maka dalam kurun dua tahun beroperasi, aset Unit Usaha Syariah telah bertumbuh Rp4,25 miliar. Hal tersebut merupakan bukti keseriusan Perseroan untuk menggarap pasar penjaminan syariah di Jawa Barat.

Pada semester kedua tahun 2016 juga, Perseroan mencoba untuk melakukan ekspansi bisnis penjaminan kredit konsumtif menuju ruang lingkup nasional, dimana Perseroan telah melakukan inisiasi kerjasama dengan beberapa Bank Umum Nasional dan Perusahaan Asuransi yang memiliki ruang lingkup bisnis secara nasional. Hasil dari inisiasi tersebut akan bisa dirasakan pada tahun 2017, dan Perseroan optimis bahwa proses inisiasi tersebut akan menuai hasil yang positif pada tahun 2017.

2017: TAHAP PENGEMBANGAN



Tahun 2017 merupakan tahun dimana Perseroan mengalami penurunan perolehan laba bersih senilai Rp1,31 miliar atau 24,26% lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2016. Meskipun secara garis besar kinerja penjaminan tumbuh 25,73% dan pendapatan cash basis mengalami peningkatan dari Rp51,09 miliar menjadi Rp77,25 miliar. Pendapatan usaha dari investasi pun mengalami peningkatan sebesar 10,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Di samping itu, beban klaim mengalami peningkatan sebesar 74,95% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selain itu, penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin Pasal 62 ayat (1), yang merupakan penegasan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-16/D.05/2017 Tentang Pencatatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) mengakibatkan proyeksi pendapatan Imbal Jasa Penjaminan secara accrual basis mengalami penurunan jika dibandingkan dengan RKAP yaitu senilai Rp506,57 juta.

Secara umum, perkembangan Perseroan tahun 2017 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Ditandatangani beberapa kerjasama, diantaranya:

- a. Kerjasama penjaminan kredit modal usaha dan pola potong gaji dengan BPR Dipon Sejahtera.
 - b. Perpanjangan kerjasama SP3 induk penjaminan pola potong gaji untuk Koperasi Pensiunan serta kerjasama penjaminan bank garansi dan pengadaan barang/jasa konstruksi dengan Bank BJB.
 - c. Kerjasama penjaminan kredit pola potong gaji, kredit konstruksi, dan kredit modal kerja dengan Bank Kesejahteraan Ekonomi.
 - d. Kerjasama dengan Dinas KUK Provinsi Jawa Barat, INKINDO Jawa Barat, BPRS HIK Cibitung, BPRS Artha Madani.
 - e. Kerjasama kafalah pembiayaan tunjangan sertifikasi guru dengan BPRS Harta Insan Karimah Tegal.
 - f. Addendum kerjasama dengan LPDB.
 - g. Kerjasama penjaminan kredit pola potong gaji dan kredit modal usaha kepada KUMKM dengan BPR Kota Bandung.
2. Perubahan rencana kerja dan anggaran Perusahaan yang sebelumnya menggunakan asumsi semi *accrual* menjadi *accrual* murni dan pada tanggal 24 November 2017 para Pemegang Saham menyetujui Perubahan RKAP menjadi RKAP Perubahan dengan dilaksanakan RUPS Sirkuler.

2018: TAHAP PENGEMBANGAN II

Tahun 2018 merupakan tahun dimana Perseroan kembali mengalami penurunan perolehan laba bersih senilai Rp2,77 miliar atau 67,52% lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017. Dengan kata lain, Perseroan hanya mampu membukukan laba bersih senilai Rp1,33 miliar di tahun 2018.

Volume penjaminan mengalami penurunan dari Rp2,98 triliun menjadi Rp2,93 triliun atau sebesar 1,85% lebih rendah, dengan pendapatan cash basis menurun secara signifikan dari Rp77,25 miliar menjadi Rp46,72 miliar. Hal ini disebabkan tidak berjalannya penjaminan multiguna dengan mitra utama. Selain itu, tingginya beban klaim, yaitu senilai Rp22,49 miliar, yang melebihi anggaran, yaitu senilai Rp16 miliar, menyebabkan turunnya kinerja Perseroan.



Secara umum, perkembangan Perseroan tahun 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Ditandatangani beberapa kerjasama, diantaranya:
 - a. Kerjasama kogaransi dengan Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Banten.
 - b. Kerjasama dengan 5 KADINDA dan BPR Kota Bandung.
 - c. Kerjasama kafalah pembiayaan konsumtif pola potong tunjangan sertifikasi guru dengan PT BPRS Bandar Lampung.
2. Melakukan beberapa diskusi pengembangan Perseroan, diantaranya:
 - a. Komisi III DPRD Provinsi Banten.
 - b. Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah.
 - c. DPRD Kabupaten Bangka Tengah.
 - d. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

2019 : TAHAP PENGEMBANGAN III

Tahun 2019 merupakan tahun kebangkitan dimana Perseroan kembali mengalami kenaikan perolehan laba bersih senilai Rp3,84 miliar atau 164,71% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini sejalan dengan meningkatnya volume penjaminan dari Rp2,93 triliun menjadi Rp5,78 triliun atau sebesar 97,40% lebih tinggi, dengan pendapatan cash basis meningkat secara signifikan dari Rp46,72 miliar menjadi Rp136,22 miliar. Hal ini disebabkan meningkatnya share penjaminan multiguna dari mitra utama. Selain itu, beban klaim hanya terserap 91,47% senilai Rp22,63 miliar dari anggaran Rp24,75 miliar sehingga laba perseroan mengalami kenaikan yang signifikan.



2.4 Visi Misi Perseroan



Meningkatkan Kegiatan ekonomi KUMKM dan Memberikan Manfaat bagi Pemangku Kepentingan melalui Penjaminan Kredit yang Efisien, Profesional dan Berintegritas.

VISI

Menjadi Perusahaan Penjamin Kredit Terpercaya yang Berkontribusi pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah.



2.5 Nilai-Nilai Perseroan



JAMKRIDA JABAR **BISA!**

2.6 Kegiatan Usaha



**PENJAMINAN
KREDIT MIKRO**



**PENJAMINAN
KREDIT KONSTRUKSI /
PENGADAAN BARANG DAN JASA**



**PENJAMINAN
KREDIT CINTA RAKYAT**



**PENJAMINAN
KREDIT MIKRO UTAMA**



**PENJAMINAN
KREDIT MULTIGUNA**



SURETY BOND



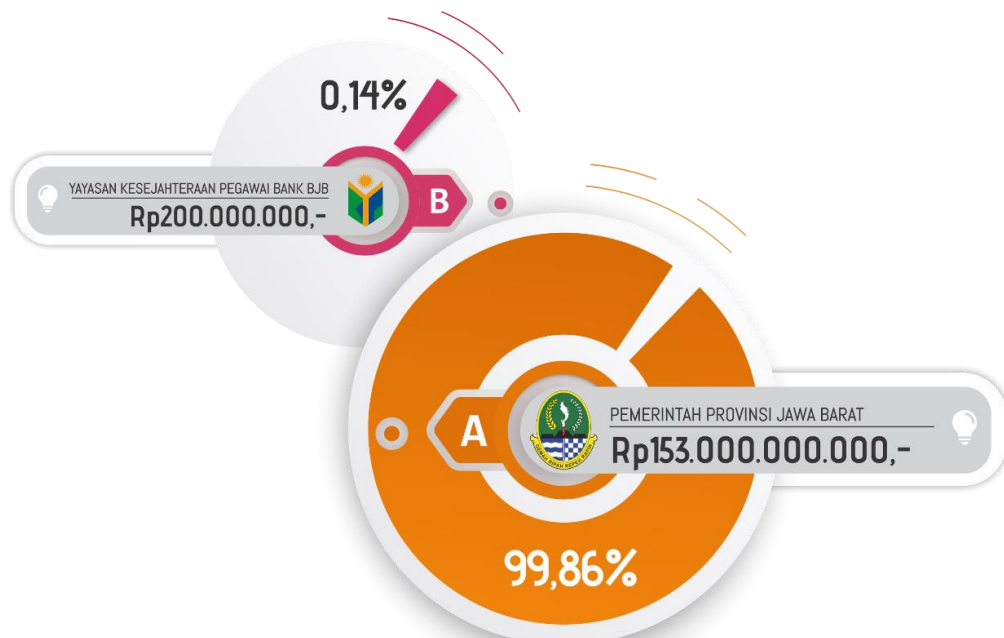
**PENJAMINAN
KREDIT KOMERSIAL/UMUM**



**PENJAMINAN
BANK GARANSI**

2.7 Komposisi Pemegang Saham

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat Bab V Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah)”. Adapun modal yang telah disetor kepada PT Jamkrida Jabar sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp153,2 miliar dengan rincian sebagai berikut:



2.8 Profil Dewan Komisaris



RODHIALLAH

Komisaris Utama

Diangkat sebagai Komisaris Utama PT Jamkrida Jabar pada tanggal 23 November 2012. Lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1990. Memiliki pengalaman kerja selama lebih dari 20 tahun sebagai auditor internal pemerintah (Perwakilan BPKP) termasuk Inspektorat Kementerian BUMN sampai dengan tahun 2011 sebelum beralih masuk ke jajaran manajemen di sektor swasta.

SYAFRIAL FIRDAUS

Komisaris

Diangkat sebagai Komisaris PT Jamkrida Jabar pada tanggal 30 April 2015. Menyelesaikan studi di STAN pada tahun 1987, kemudian melanjutkan jenjang pendidikannya di STIE-IPWI dan STIE-YAI. Sebelum menjabat sebagai Komisaris PT Jamkrida Jabar, beliau menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko, membangun dan memantau Manajemen Risiko pada PT Asuransi Takaful Umum.

DINI ROSDINI

Komisaris Independen

Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Jamkrida Jabar pada tanggal 26 November 2019. Beliau meraih gelar doktor di bidang ilmu akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2014. Menyelesaikan Pendidikan Magister dan Sarjana di Universitas Padjadjaran. Beliau juga menjabat sebagai Komite Pemantau Risiko pada PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk serta sebagai Komite Audit pada PT Mitrabara Adiperdana, Tbk.

2.9 Profil Dewan Pengawas Syariah

ZAINI ABDUL MALIK

Ketua Dewan Pengawas Syariah

Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada bulan April 2015. Lulus dari IAIN SGD Bandung tahun 1999, kemudian beliau meneruskan pendidikannya di Sekolah Pascasarjana UIN Syahid Jakarta tahun 2008. Beliau merupakan Dosen Fakultas Syari'ah di UNISBA. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Forum Ekonomi Syari'ah Jakarta (Fajar Esya) pada tahun 2002-2003, dan beliau terdaftar sebagai Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) PW. Muhammadiyah Jawa Barat Periode 2010-2015. Beliau juga menyusun karya-karya ilmiah Ekonomi Islam/Ekonomi Syari'ah.

KHOZIN ABU FAQIH

Dewan Pengawas Syariah

Diangkat sebagai Dewan Pengawas Syariah di PT Jamkrida Jabar pada bulan April 2015. Lulus dari LIPIA (Univ. Imam Ibnu Saud, Riyadh) cabang Jakarta, pada tahun 1996. Adapun riwayat karir profesionalnya adalah sebagai Dosen Ma'had Shalahuddin Bogor (1994-1996), Dosen Ma'had Al-Imarat Bandung (2000-2009), Pengisi Kajian Wawasan Islam MQFM (2010-2012), Pengasuh Pesantren Inovatif Al-Ibda' dan pesantren Al-Ilham (SMK Perbankan Syariah) (2013-sekarang). Beliau juga dikenal sebagai penulis dan penerjemah buku-buku Islam.



2.10 Profil Direksi

**TRI BUDHI MULJAWAN****Direktur Utama**

Diangkat sebagai Direktur Utama PT Jamkrida Jabar pada bulan Mei 2014. Beliau menyelesaikan Pendidikan Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi negara (STAN) pada tahun 1999. Memulai pekerjaan profesionalnya sebagai Auditor Pajak di Direktorat Jenderal Pajak dari mulai tahun 1991 sampai dengan tahun 2000. Melanjutkan karirnya sebagai Spv. *Tax & Treasury* di PT Patra Nusa Data (2000-2002), Tim Inti Implementasi SAP di PT Elnusa. Kemudian beliau melanjutkan karirnya di *Bosowa Group* dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014. Jabatan terakhir yang diembannya adalah sebagai CFO & kadiv *Strategic Planning* dan Direktur Keuangan di PT Bosowa Sekuritas.

BUDI SETYONO**Direktur Keuangan**

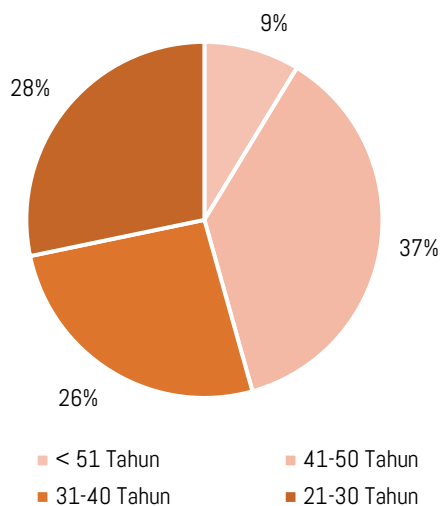
Diangkat sebagai Direktur Keuangan PT Jamkrida Jabar pada tahun 2014. Beliau menyelesaikan Pendidikan Magister di Universitas Pasundan pada tahun 2016, setelah sebelumnya meraih gelar Akuntan di STAN tahun 1997. Beliau pernah menjadi Direktur Keuangan dan Umum PT Agronesia (2012-2014), CFO *Transportation Group* di *Bosowa Corporation* (2011-2012) GM *Finance & Accounting* di *Group Automotives Bosowa Corporation* (2009-2011), *Budget Controller* di PT Jawamanis di PDAM Pati-Jawa Tengah (2007), Manager keuangan & Administrasi di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (2004), *Team Leader* (auditor) di BPKP (1999).

ASEP GUNAWAN SIRAD**Direktur Operasional**

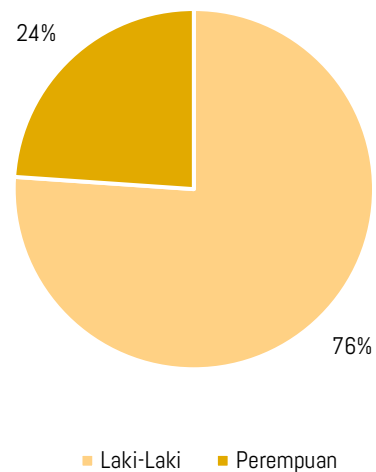
Diangkat sebagai Direktur Operasional PT Jamkrida Jabar pada tanggal 23 November 2012. Lulus dari Universitas Langlangbuana Bandung. Memulai karirnya pada tahun 1996 di PT Sarana Lindung Upaya sebagai Staf Pemasaran. Pada tahun 2006, diangkat menjadi Kepala Seksi Pemasaran di perusahaan yang sama. Karirnya terus meningkat di PT Sarana Lindung Upaya sampai akhirnya menjabat Kepala Kantor Wilayah Barat merangkap sebagai Kepala Cabang Bandung di tahun 2011. Pada tahun 2012, sempat menjabat sebagai Koordinator Satuan Tugas Khusus Pemasaran Langsung *Non Captive* Wilayah Jawa Barat, Renbang (Pj. Kepala Divisi IT Kantor Pusat), Pj. Kepala Divisi SPI Kantor Pusat dan kepala cabang Jakarta Penugasan Khusus.

**2.11 Komposisi Karyawan**

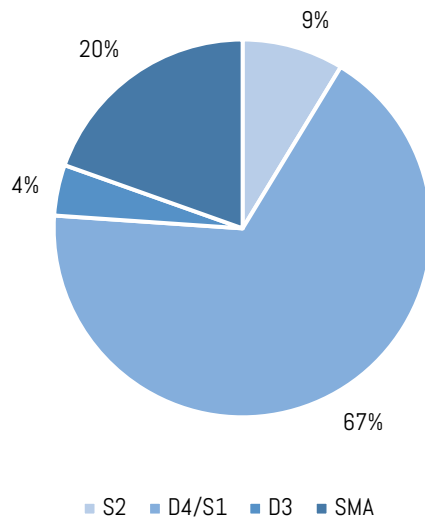
Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Usia



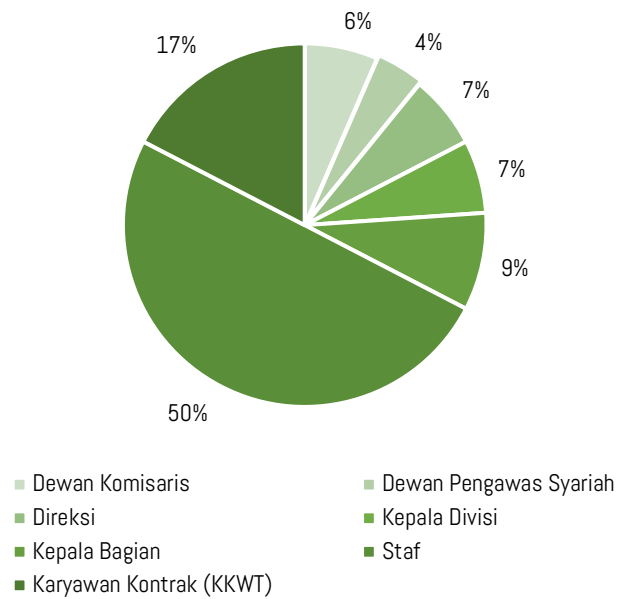
Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Gender



Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan



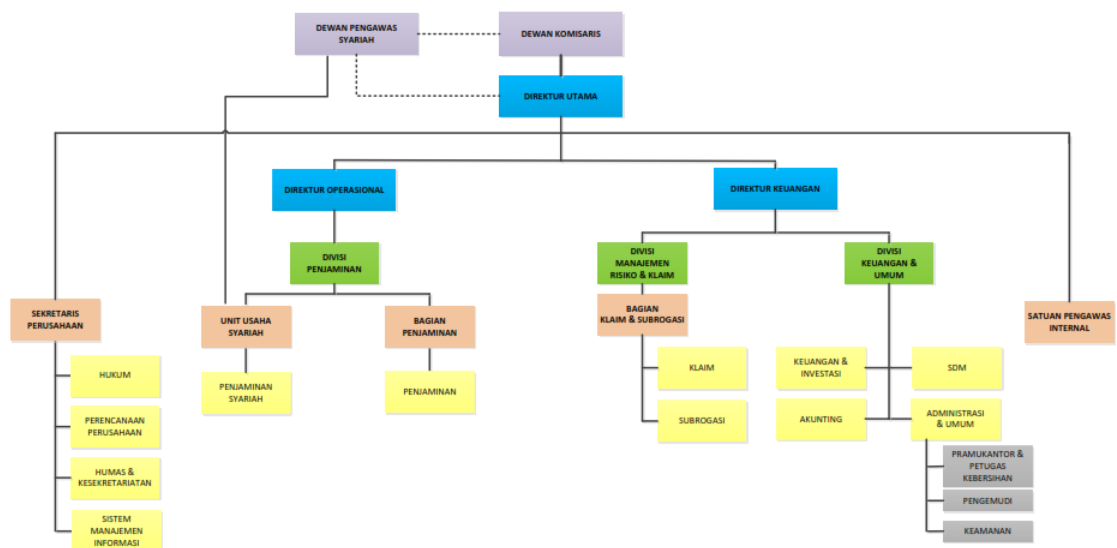
Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Posisi Manajemen



Komposisi karyawan PT Jamkrida Jabar tahun 2019 adalah 46 karyawan, bertambah 1 Komisaris Independen.

2.12 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI PT JAMKRIDA JABAR



Struktur organisasi diatas merupakan struktur organisasi untuk mengantisipasi kebutuhan organisasi di masa mendatang. Namun, mengingat faktor efisiensi biaya, beberapa kotak jabatan belum diisi, yakni para Kepala Bagian dibawah Divisi Keuangan, Kepala Bagian Manajemen Risiko dan Pengendalian, serta Kepala Bagian Pemasaran. Job dari Kepala Bagian tersebut masih dikerjakan oleh atasan (para Kepala Divisi terkait).

Struktur organisasi merupakan organ dalam perusahaan yang dinamis, yang bisa berubah setiap saat menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan faktor biaya.

KINERJA PERSEROAN



BAB III

KINERJA PERSEROAN

Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi termaju di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan perekonomian yang tinggi serta dengan tingkat stabilitas makro ekonomi yang tetap terjaga, akan mendorong pertumbuhan jumlah Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). Salah satu karakteristik yang melekat pada sebagian besar KUMKM dan sekaligus menjadi sumber permasalahannya adalah lemahnya struktur permodalan dan kurangnya akses kepada sumber pembiayaan (lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan) yang disebabkan oleh adanya keterbatasan agunan.



Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah KUMKM di Jawa Barat, serta ketersediaan fasilitas penjaminan kredit, akan berdampak pada meningkatnya permintaan kredit, dan akan memberikan peluang bagi industri penjaminan kredit khususnya di Jawa Barat untuk tumbuh secara berkelanjutan pada masa yang akan datang.



Dengan menjalankan "*vision & mission statement*" sesuai dengan niat awal pembentukan Perseroan sebagai Lembaga Penjaminan Kredit Daerah, dalam jangka panjang Perseroan akan menjadi "Perusahaan Penjaminan Kredit Pilihan Masyarakat Jawa Barat" tentunya, secara tidak langsung akan memberikan kontribusi pada perekonomian Jawa Barat. Maka Produk Penjaminan Kredit dan jasa konsultasi pengembangan UMKM dalam mengakses perbankan menjadi jasa utama perusahaan.

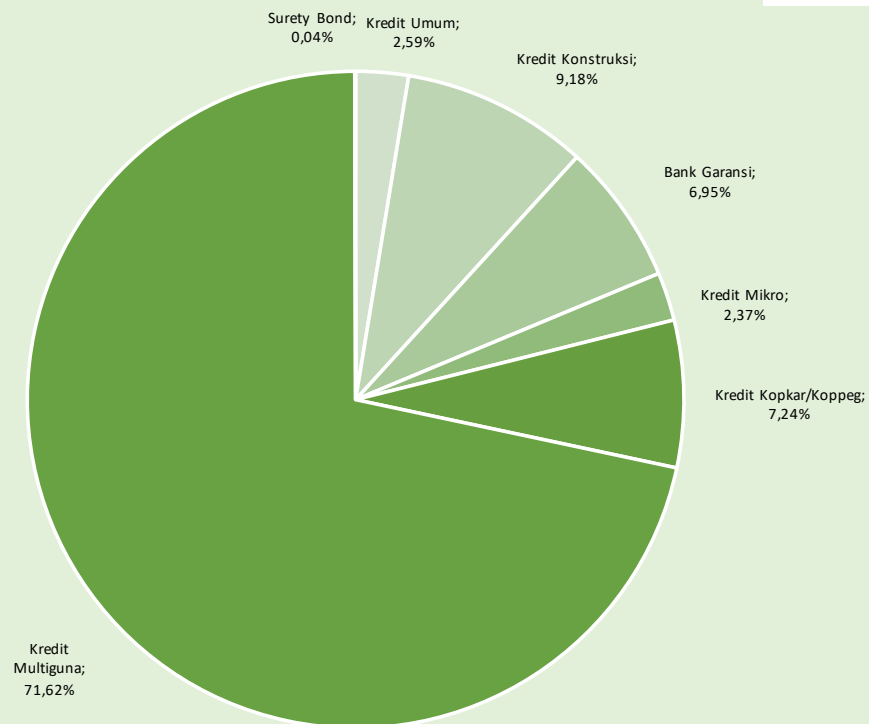
3.1 Aspek Penjaminan

VOLUME PENJAMINAN TAHUN 2018 DAN 2019

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	REALISASI 2018	RKAP 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	GROWTH 2018-2019
Per Kredit					
Produktif	1.592.703,54	2.295.526,91	1.641.326,21	71,50%	3,05%
Non Produktif	1.337.199,04	2.900.903,22	4.142.170,46	142,79%	209,76%
Total	2.929.902,57	5.196.430,13	5.783.496,67	111,30%	97,40%
Per Produk					
Kredit Umum	100.372,90	115.669,79	149.803,47	129,51%	49,25%
Kredit Konstruksi	755.939,57	1.209.118,80	531.162,32	43,93%	-29,73%
Bank Garansi	411.966,13	637.166,14	401.911,82	63,08%	-2,44%
Kredit Mikro	86.118,59	113.825,39	137.206,35	120,54%	59,32%
Kredit Kopkar/Koppeg	222.323,18	191.534,26	418.687,67	218,60%	88,32%
Kredit Multiguna	1.337.199,04	2.900.903,22	4.142.170,46	142,79%	209,76%
Surety Bond	15.983,16	28.212,52	2.554,58	9,05%	-84,02%
Total	2.929.902,57	5.196.430,13	5.783.496,67	111,30%	97,40%

2019



Jumlah KUMKM Terjamin: 46.832

Jumlah Tenaga Kerja Terserap: 442.803

LAPORAN VOLUME KREDIT
PT JAMKRIDA JABAR
TAHUN 2018 DAN 2019

dalam jutaan rupiah

URAIAN	REALISASI 2018	RKAP 2019	REALISASI 2019	CAPAAN 2019	GROWTH 2018-2019
	1	2	3	4 = 3/2	5 = (3-1)/1
Per Kredit					
Produktif	1.916.227,24	2.146.728,53	1.540.389,02	71,76%	-19,61%
Non Produktif	1.337.199,04	3.538.069,36	4.544.082,28	128,43%	239,82%
Jumlah	3.253.426,27	5.684.797,90	6.084.471,31	107,03%	87,02%
Per Produk					
Kredit Umum	148.617,40	171.121,82	227.655,00	133,04%	53,18%
Kredit Konstruksi	1.004.898,40	1.608.943,78	708.578,30	44,04%	-29,49%
Bank Garansi	411.966,13	637.166,14	401.911,82	63,08%	-2,44%
Kredit Mikro	112.438,96	146.916,16	182.913,48	124,50%	62,68%
Kredit Kopkar/Koppeg	222.323,18	191.534,26	418.687,67	218,60%	88,32%
Kredit Multiguna	1.337.199,04	2.900.903,22	4.142.170,46	142,79%	209,76%
Surety Bond	15.983,16	28.212,52	2.554,58	9,05%	-84,02%
Jumlah	3.253.426,27	5.684.797,90	6.084.471,31	107,03%	87,02%

LAPORAN IJP CASH BASIS
PT JAMKRIDA JABAR
TAHUN 2018 DAN 2019

dalam jutaan rupiah

URAIAN	REALISASI 2018	RKAP 2019	REALISASI 2019	CAPAAN 2019	GROWTH 2018-2019
	1	2	3	4 = 3/2	5 = (3-1)/1
Per Kredit					
Produktif	19.183,49	22.372,96	19.042,73	85,11%	-0,73%
Non Produktif	27.537,31	79.319,47	117.183,51	147,74%	325,54%
Jumlah	46.720,80	101.692,42	136.226,24	133,96%	191,58%
Per Produk					
Kredit Umum	2.423,36	2.937,82	3.816,11	129,90%	57,47%
Kredit Konstruksi	8.387,11	14.002,97	5.993,77	42,80%	-28,54%
Bank Garansi	3.421,19	5.169,16	3.340,33	64,62%	-2,36%
Kredit Mikro	1.795,56	2.552,67	3.477,47	136,23%	93,67%
Kredit Kopkar/Koppeg	2.980,43	2.573,07	5.726,25	222,55%	92,13%
Kredit Multiguna	27.537,31	74.150,31	113.843,18	153,53%	313,41%
Surety Bond	175,84	306,42	29,13	9,51%	-83,43%
Jumlah	46.720,80	101.692,42	136.226,24	133,96%	191,58%

LAPORAN IJP ACCRUAL BASIS
PT JAMKRIDA JABAR
TAHUN 2018 DAN 2019

dalam jutaan rupiah

URAIAN	REALISASI 2018	RKAP 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	GROWTH 2018-2019
	1	2	3	4 = 3/2	5 = (3-1)/1
Per Kredit					
Produktif	18.737,15	23.293,17	14.994,97	64,37%	-19,97%
Non Produktif	21.130,52	28.334,28	30.964,64	109,28%	46,54%
Jumlah	39.867,67	51.627,45	45.959,61	89,02%	15,28%
Per Produk					
Kredit Umum	1.628,85	2.241,54	2.462,37	109,85%	51,17%
Kredit Konstruksi	7.487,01	14.990,86	6.445,35	43,00%	-13,91%
Bank Garansi	3.380,97	5.627,84	3.314,72	58,90%	-1,96%
Kredit Mikro	5.811,73	5.321,91	4.796,27	90,12%	-17,47%
Kredit Kopkar/Koppeg	257,53	699,34	1.270,73	181,70%	393,43%
Kredit Multiguna	21.130,52	22.706,44	27.649,92	121,77%	30,85%
Surety Bond	171,06	39,52	20,26	51,26%	-88,16%
Jumlah	39.867,67	51.627,45	45.959,61	89,02%	15,28%

note : *nilai anggaran dan realisasi telah dikurangi nilai restitusi

LAPORAN JUMLAH KUMKM TERJAMIN DAN TENAGA KERJA TERSERAP
PT JAMKRIDA JABAR
TAHUN 2018 DAN 2019

dalam satuan orang/unit

URAIAN	REALISASI 2018	RKAP 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	GROWTH 2018-2019
	1	2	3	4 = 3/2	5 = (3-1)/1
KUMKM Terjamin					
Kredit Umum	81	97	78	80,80%	-3,70%
Kredit Konstruksi	3.209	3.825	1.740	45,50%	-45,78%
Bank Garansi	6.162	7.344	4.262	58,03%	-30,83%
Kredit Mikro	24.741	29.487	33.761	114,49%	36,46%
Kredit Kopkar/Koppeg	4.823	5.748	6.978	121,39%	44,68%
Surety Bond	45	54	13	24,24%	-71,11%
Jumlah	39.061	46.554	46.832	100,60%	19,89%
Tenaga Kerja Terserap					
Kredit Umum	13.939	8.912	18.002	201,99%	29,15%
Kredit Konstruksi	351.816	224.940	236.844	105,29%	-32,68%
Bank Garansi	176.787	113.032	184.171	162,94%	4,18%
Kredit Mikro	4.242	2.712	3.734	137,67%	-11,98%
Kredit Kopkar/Koppeg	-	-	-		
Surety Bond	218	139	52	37,31%	-76,15%
Jumlah	547.002	349.735	442.803	126,61%	-19,05%

PENJAMINAN KREDIT UMUM

Realisasi Volume Penjaminan Kredit Umum tahun 2019 Perseroan adalah senilai Rp149,80 miliar. Jika dibandingkan dengan target dalam RKAP Tahun 2019 senilai Rp115,67 miliar, realisasi tahun 2019 menunjukkan capaian sebesar 129,51% atau senilai Rp34,13 miliar diatas target dalam RKAP 2019. Kinerja Penjaminan Kredit Umum dapat melampaui target dikarenakan realisasi kerjasama penjaminan kredit ke BPR-BPR dari penyaluran kredit Bank BJB.

PENJAMINAN KREDIT KONSTRUKSI

Realisasi Volume Penjaminan Kredit Konstruksi tahun 2019 Perseroan adalah senilai Rp531,16 miliar. Jika dibandingkan dengan target dalam RKAP Tahun 2019 senilai Rp1,20 triliun, realisasi tahun 2019 menunjukkan capaian sebesar 43,93% atau senilai Rp677,96 miliar dibawah target dalam RKAP 2019. Kinerja Penjaminan Kredit Konstruksi tahun 2019 tidak dapat melampaui target dikarenakan banyaknya proyek pengadaan barang/jasa pemerintah daerah tertunda realisasinya akibat pelaksanaan Pilpres dan Pileg.

PENJAMINAN BANK GARANSI

Realisasi Volume Penjaminan Bank Garansi tahun 2019 Perseroan adalah senilai Rp401,91 miliar. Jika dibandingkan dengan target dalam RKAP Tahun 2019 yang diproyeksikan senilai Rp637,16 miliar, realisasi tahun 2019 menunjukkan capaian sebesar 63,08% atau senilai Rp235,25 juta dibawah target dalam RKAP 2019, hal ini sejalan dengan tidak tercapainya kredit konstruksi akibat pelaksanaan Pilpres dan Pileg.

PENJAMINAN KREDIT MIKRO

Realisasi Volume Penjaminan Kredit Mikro tahun 2019 Perseroan adalah senilai Rp137,21 miliar. Jika dibandingkan dengan target dalam RKAP Tahun 2019 senilai Rp113,83 miliar, realisasi tahun 2019 menunjukkan capaian sebesar 120,54% atau senilai Rp23,38 miliar diatas target dalam RKAP 2019.

PENJAMINAN KREDIT KOPKAR/KOPPEG

Realisasi Volume Penjaminan Kredit Kopkar/Koppeg tahun 2019 Perseroan adalah senilai Rp418,69 miliar. Jika dibandingkan dengan target dalam RKAP Tahun 2019 senilai Rp191,53 miliar, realisasi tahun 2019 menunjukkan capaian sebesar 218,60% atau senilai Rp227,15 miliar diatas target dalam RKAP 2019.

PENJAMINAN KREDIT MULTIGUNA

Realisasi Volume Penjaminan Kredit Multiguna tahun 2019 Perseroan adalah senilai Rp4,14 triliun. Jika dibandingkan dengan target dalam RKAP Tahun 2019 senilai Rp2,90 triliun, realisasi tahun 2019 menunjukkan capaian sebesar 142,79% atau senilai Rp1,24 triliun diatas target dalam RKAP 2019. Kinerja Penjaminan Kredit Multiguna tahun 2019 dapat melampaui target dikarenakan meningkatnya share penjaminan kredit multiguna dari bank bjb.

SURETY BOND

Realisasi Surety Bond tahun 2019 Perseroan adalah senilai Rp2,55 miliar. Jika dibandingkan dengan target dalam RKAP Tahun 2019 senilai Rp28,12 miliar, realisasi tahun 2019 menunjukkan capaian sebesar 9,05% atau senilai Rp25,65 miliar dibawah target dalam RKAP 2019. Kinerja Surety Bond tahun 2019 tidak dapat mencapai target sejalan dengan tidak tercapainya kredit konstruksi dan bank garansi akibat pelaksanaan Pilpres dan Pileg.

3.2 Aspek Keuangan

Berdasarkan Laporan Keuangan (Audited) PT Jamkrida Jabar per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

PT JAMKRIDA JABAR

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018 DAN 2019

dalam jutaan rupiah

	2018 (AUDITED)	RKAP 2019	2019 (AUDITED)	CAPAIAN 2019	GROWTH 2018-2019
PENDAPATAN PENJAMINAN					
Imbal Jasa Penjaminan	41.301,95	51.627,45	47.732,91	92,46%	15,57%
Beban Akuisisi	(5.414,68)	(5.998,02)	(6.835,63)	113,96%	26,24%
Restitusi IJP	(1.434,28)	-	(1.773,30)		23,64%
Manajemen Fee	744,03	4.766,44	3.219,84	67,55%	332,75%
JUMLAH PENDAPATAN PENJAMINAN	35.197,02	50.395,87	42.343,82	84,02%	20,31%
BEBAN KLAIM					
Beban Klaim	(22.490,35)	(24.748,25)	(22.636,37)	91,47%	0,65%
Beban (Pemulihan) Cadangan Klaim	265,77	(2.504,74)	(858,42)	34,27%	-423,00%
Beban Regaransi	(11.580,81)	(13.144,04)	(14.268,88)	108,56%	23,21%
JUMLAH BEBAN KLAIM	(33.805,38)	(40.397,03)	(37.763,68)	93,48%	11,71%
PENDAPATAN PENJAMINAN BERSIH	1.391,63	9.998,84	4.580,13	45,81%	229,12%
PENDAPATAN INVESTASI	13.359,58	14.817,99	14.935,39	100,79%	11,80%
PENDAPATAN SUBROGASI	3.231,63	999,81	3.218,32	321,89%	-0,41%
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	(1.649,13)	(2.741,24)	(2.379,18)	86,79%	44,27%
BEBAN USAHA					
Beban Operasional	(1.580,91)	(2.084,00)	(2.001,36)	96,03%	26,60%
Beban Sumber Daya Manusia	(11.074,81)	(12.705,62)	(11.415,12)	89,84%	3,07%
Beban Administrasi dan Umum	(2.846,27)	(4.268,00)	(3.422,31)	80,19%	20,24%
JUMLAH BEBAN USAHA	(15.501,98)	(19.057,62)	(16.838,79)	88,36%	8,62%
LABA SEBELUM PAJAK	831,73	4.017,77	3.515,88	87,51%	322,72%
BEBAN PAJAK PENGHASILAN					
Beban Pajak Kini	-	-	-		
Manfaat Pajak tangguhan	501,86	-	392,04		-21,88%
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN	501,86	-	392,04		-21,88%
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	1.333,59	4.017,77	3.907,91	97,27%	193,04%
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	117,19	-	(67,54)		-157,64%
LABA KOMPREHENSIF	1.450,78	4.017,77	3.840,37	95,58%	164,71%

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

dalam jutaan rupiah

	2018 (AUDITED)	RKAP 2019	2019 (AUDITED)	CAPAIAN 2019	GROWTH 2018-2019
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan Setara Kas	139.780,66	193.050,80	171.333,69	88,75%	22,57%
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	8.659,87	2.671,73	4.544,90	170,11%	-47,52%
Beban Dibayar Dimuka	11.768,54	28.870,83	18.522,77	64,16%	57,39%
Aset Keuangan	2.000,00	2.000,00	35.092,00	1754,60%	1654,60%
Properti Investasi	2.445,00	2.445,00	2.472,00	101,10%	1,10%
JUMLAH ASET LANCAR	164.654,08	229.038,36	231.965,36	101,28%	40,88%
ASET TETAP					
Aset Tetap	12.246,52	11.450,75	11.699,14	102,17%	-4,47%
JUMLAH ASET TETAP	12.246,52	11.450,75	11.699,14	102,17%	-4,47%
ASET TIDAK LANCAR					
Beban Dibayar Dimuka - Jangka Panjang	40.751,57	56.708,94	94.168,00	166,05%	131,08%
Aset Keuangan - Jangka Panjang	40.117,68	44.055,00	14.071,25	31,94%	-64,93%
Aset Pajak Tangguhan	6.856,02	6.393,22	7.270,57	113,72%	6,05%
Aset Lain-lain	717,05	278,82	974,84	349,62%	35,95%
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	88.442,33	107.435,98	116.484,65	108,42%	31,71%
JUMLAH ASET	265.342,93	347.925,09	360.149,16	103,51%	35,73%
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang Pajak	275,36	370,49	383,57	103,53%	39,30%
Utang Re/Cogransi	3.289,61	4.758,63	4.572,29	96,08%	38,99%
Beban Yang Masih Harus Dibayar	1.267,54	-	898,40	-	-29,12%
Penampungan Sementara	3.048,70	760,73	4.008,55	526,94%	31,48%
Utang Lancar Lainnya	65,47	1.092,62	12,89	1,18%	-80,31%
Pendapatan Diterima Dimuka - Jangka Pendek	23.943,19	45.079,55	32.073,36	71,15%	33,96%
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	31.889,88	52.062,01	41.949,07	80,58%	31,54%
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Pendapatan Diterima Dimuka - Jangka Panjang	70.909,00	133.626,15	151.295,08	113,22%	113,37%
Cadangan Klaim	3.192,04	5.009,48	4.050,46	80,86%	26,89%
Liabilitas Imbalan Paska Kerja	1.266,83	-	1.776,03	-	40,19%
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	75.367,87	138.635,64	157.121,57	113,33%	108,47%
JUMLAH LIABILITAS	107.257,75	190.697,65	199.070,65	104,39%	85,60%
EKUITAS					
Modal	153.200,00	153.200,00	153.200,00	100,00%	0,00%
Cadangan Umum	3.761,25	9,67	4.094,65	42329,63%	8,86%
Saldo Laba (Rugi)	1.333,59	4.017,77	3.907,91	97,27%	193,04%
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga	(66,00)	-	87,16	-	-232,05%
Keuntungan (Kerugian) Pengukuran Kembali	(143,66)	-	(211,20)	-	47,01%
Imbalan Pasti Setelah Aset Pajak Tangguhan	-	-	-	-	-
JUMLAH EKUITAS	158.085,18	157.227,44	161.078,51	102,45%	1,89%
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	265.342,93	347.925,09	360.149,16	103,51%	35,73%

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

1. TOTAL ASET

Total Aset Perseroan per 31 Desember 2019 adalah senilai Rp360,15 miliar, meningkat sebesar 35,73% jika dibandingkan dengan tahun 2018 senilai Rp265,34 miliar. Pencapaian dari RKAP (Rp347,92 miliar) sebesar 103,51%. Capaian total aset meningkat cukup signifikan karena capaian IJP *cash basis* dari sektor non produktif.

2. LABA (RUGI) PERSEROAN

Pada tahun 2019, Perseroan membukukan laba bersih senilai Rp3,91 miliar atau sebesar 97,27% dari RKAP 2019 yang ditargetkan senilai Rp4,02 miliar. Capaian ini dikontribusi oleh realisasi pendapatan subrogasi sebesar 321,89% dan efisiensi biaya usaha 88,36% dari RKAP 2019.

3.3 Aspek Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko PT Jamkrida Jabar adalah proses yang dilakukan untuk mengelola risiko yang melekat pada setiap proses bisnis di setiap bagian dan level dalam perusahaan sehingga mampu memberikan keyakinan tercapainya tujuan dan mengurangi ketidakpastian yang melekat pada suatu proses bisnis yang ada akhirnya akan menciptakan kesempatan atau *opportunity* secara lebih sistematis.

Secara umum, proses manajemen risiko yang dilaksanakan terdiri dari 4 tahap utama, yaitu:

1. Identifikasi risiko
2. Penilaian risiko/*risk assessment*
3. Penanganan risiko/*risk response*
4. *Monitoring* dan evaluasi

Dalam melaksanakan penjaminan kredit, perusahaan harus tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko penjaminan, risiko klaim, risiko keuangan, risiko hukum, dan risiko lainnya yang berpotensi merugikan perusahaan.

Perusahaan penjaminan sangat rentan terhadap risiko. Pada umumnya karakteristik risiko penjaminan bersifat *speculative* (risiko moral hazard). Beberapa strategi yang dilakukan Perseroan dalam melakukan mitigasi risiko penjaminan adalah dengan cara mempersyaratkan agunan, pembentukan cadangan klaim, penjaminan ulang dan penjaminan bersama dengan Perusahaan penjaminan sejenis ataupun Perusahaan asuransi (*re-guarantee*, dan *co-guarantee*).

Kegiatan Manajemen Risiko PT Jamkrida Jabar masih bersifat periodik dan insidental. Dimana secara periodik khususnya dalam laporan bulanan maupun triwulan ditampilkan profil risiko setiap skim kredit yang dijamin serta mitra bisnis sehingga dapat dijadikan tolak ukur serta pengambilan keputusan manakala profil risikonya menunjukkan indikasi kerugian bagi perusahaan kedepannya. Untuk penerapan manajemen risiko secara insidental dalam bentuk kajian-kajian manajemen risiko terkait penilaian kegiatan yang akan ditempuh oleh Perusahaan (kajian mitra usaha dalam rangka kerjasama baru, penempatan deposito, pembelian obligasi, dan lain-lain). Hasil dari analisa dan penilaian risiko tersebut akan dibahas rapat Manajemen PT Jamkrida Jabar untuk menentukan mitigasi risiko yang akan dilakukan.

Perseroan pun memiliki beberapa komite dibawah Direksi, adalah Komite Penjaminan dan Komite Manajemen Risiko dan Klaim yang rutin mengadakan pertemuan bersama untuk membahas dan membuat analisa terkait rencana kerjasama penjaminan dengan para mitra baru, menganalisa permohonan penjaminan yang nilai penjaminannya memerlukan pertimbangan khusus, komite klaim dengan nilai pengajuan yang besar, dan juga membahas terkait kejadian-kejadian luar biasa dalam kinerja operasional Perseroan.

Dengan adanya beberapa komite dibawah Direksi tersebut, maka Perseroan dapat meminimalisir kemungkinan kerugian pada Perseroan di masa yang akan datang. Beberapa mitigasi risiko yang dilakukan Perseroan pada tahun 2019, diantaranya:

1. Melakukan pembaharuan perjanjian kerjasama (PKS) dengan menambahkan klausula yang dapat digunakan untuk meminimalkan risiko.
2. Melakukan penyebaran risiko dengan menempatkan sebagian risiko (*re/cogaransi*) ke 2 (dua) perusahaan reasuransi yaitu NasionalRe dan IndonesiaRe (konvensional dan syariah).
3. Melakukan *co-guarantee* dengan Perusahaan Penjaminan lainnya untuk meminimalkan risiko penjaminan dengan tetap melakukan evaluasi kinerja secara berkala terhadap perusahaan penjaminan tersebut.

4. Melakukan pencatatan *loss ratio* untuk memetakan besaran risiko yang akan ditransfer ke mitra *co-guarantee/re-guarantee*.
5. Melakukan *updating* data piutang subrogasi termasuk agunan sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan upaya penagihan piutang subrogasi agar upaya tersebut dapat dilakukan secara efektif, baik langsung maupun melalui agen/pihak ke-3 dalam hal penagihan.
6. Mengoptimalkan penagihan piutang subrogasi.
7. Menerapkan metode *Stoploss* khusus untuk skim kredit yang dianggap risikonya tinggi.
8. Melakukan pemilihan bank untuk penempatan deposito, dimana deposito ditempatkan di bank-bank yang berkinerja baik, dengan tetap mempertimbangkan resiprokal (adanya kerjasama penjaminan) yang besarnya didasarkan pada ketentuan LPS.
9. Melakukan penempatan investasi dalam bentuk obligasi yang tepat dan menguntungkan.

Adapun untuk kedepannya sebagai salah satu unsur pedoman dalam penyusunan GCG (Good Corporate Governance) maka untuk pedoman penerapan Manajemen Risiko telah ditetapkan 7 risiko sebagai parameter penilaian risiko yang dihadapi perusahaan di antaranya risiko: strategi, operasional, aset dan liabilitas, kepengurusan, tata kelola, dukungan dana (permodalan) serta risiko penjaminan.

KLAIM DAN SUBROGASI

LAPORAN KLAIM DAN SUBROGASI

PT JAMKRIDA JABAR

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2019

dalam jutaan rupiah

URAIAN	PER 31 DES 2018 (AUDITED)	RKAP 2019	PER 31 DES 2019 (AUDITED)	CAPAIAN 2019	GROWTH 2018-2019
	1	2	3	4 = 3/2	5 = (3-1)/1
BEBAN KLAIM	22.490,35	24.748,25	28.025,19	113,24%	24,61%
- Konvensional	20.594,18	22.786,72	25.617,24	112,42%	24,39%
- Syariah	1.896,16	1.961,53	2.407,95	122,76%	26,99%
PENDAPATAN SUBROGASI	3.231,63	999,81	3.218,32	321,89%	-0,41%
- Konvensional	3.153,82	856,12	3.143,17	367,14%	-0,34%
- Syariah	77,81	143,68	75,15	52,30%	-3,42%

A. KLAIM

Biaya Klaim yang terealisasi tahun 2019 adalah senilai Rp28,02 miliar atau sebesar 113,24% dari Biaya Klaim yang dianggarkan dalam RKAP 2019.

Realisasi biaya klaim yang melampaui target tersebut terutama bersumber dari kecenderungan naiknya klaim dari Kredit Multiguna, Kredit Konstruksi, dan Kredit Mikro Utama secara signifikan.

Khusus kredit multiguna klaim yang terjadi didominasi oleh klaim akibat terjamin meninggal dunia, sedangkan kredit lainnya umumnya disebabkan oleh kredit macet (wanprestasi).

Keberadaan dari perusahaan Regaransi turut andil dalam mengurangi kerugian/biaya yang disebabkan oleh beban klaim. Sebagai contohnya adalah Penjaminan Kredit Multiguna yang diregaransikan dengan share sebanyak 50%, berarti bahwa Perseroan hanya memiliki kewajiban pembayaran sebesar 50% dari total biaya klaim sebenarnya. Langkah tersebut terbukti sangat signifikan dalam menekan angka pembayaran klaim yang dilakukan oleh Perseroan, meskipun dikhawatirkan terjadi risiko piutang reasuransi dari perusahaan reasuransi apabila beban klaim yang menjadi tanggung jawab perusahaan reasuransi lebih besar dibanding hak IJP reasuransinya.

Strategi regaransi untuk membagi potensi risiko klaim akan dijalankan oleh Perseroan untuk tahun-tahun selanjutnya, terutama untuk kredit-kredit yang memiliki potensi klaim cukup tinggi seperti Kredit Mikro, Multiguna, dan Kredit program Pemerintah seperti Kredit Cinta Rakyat, serta untuk menyeimbangkan antara komposisi kredit produktif dan non produktif agar tidak melanggar ketentuan POJK yang mempersyaratkan nilai penjaminan produktif minimal 25%.

Adapun strategi lainnya pada bidang klaim adalah melakukan sosialisasi, meningkatkan pemahaman penerima jaminan tentang prosedur pembayaran klaim oleh Perseroan, meningkatkan akurasi analisa klaim (tepat bayar dan tepat jumlah) serta menerapkan metode Stop loss khusus untuk skim kredit yang dianggap risikonya tinggi.

B. SUBROGASI

Subrogasi adalah peralihan hak tagih dan penerima jaminan kepada penjamin setelah penerima jaminan menerima pembayaran klaim dari penjamin. Perseroan sebagai pihak penjamin membukukan hasil dari penagihan subrogasi sebagai pendapatan Perseroan.

Capaian pendapatan subrogasi Perseroan tahun 2019 adalah senilai Rp3,22 miliar atau sebesar 321,89% diatas target dalam RKAP 2019 senilai Rp999,81 juta. Capaian tersebut sebagian besar diperoleh dari penyelesaian klaim kredit konstruksi dimana pengembalian

subrogasinya di periode tahun yang sama selain dari skim kredit produktif lainnya. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, pendapatan subrogasi Perseroan tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 141% atau senilai Rp3,23 miliar.

Adapun pendapatan subrogasi tahun 2019 berasal dari subrogasi atas klaim kredit multiguna, kredit cinta rakyat, bank garansi, kredit konstruksi dan kredit modal usaha dengan rincian sebagai berikut:

**KOMPOSISI PENDAPATAN SUBROGASI
PERIODE 01.01.2019 - 31.12.2019**

dalam satuan rupiah

JENIS KREDIT	SUBROGASI	REGAR	NETTO
Produktif	4.130.633.216,00	1.599.618.845,40	2.531.014.370,60
Non Produktif	1.293.758.686,00	606.451.510,83	687.307.175,17
	5.424.391.902,00	2.206.070.356,23	3.218.321.545,77

SKIM KREDIT	SUBROGASI	REGAR	NETTO
Kredit Multiguna	1.293.758.686,00	606.451.510,83	687.307.175,17
Kredit Cinta Rakyat	334.845.674,00	164.998.868,61	169.846.805,39
Bank Garansi	75.034.971,00	-	75.034.971,00
Kredit Mikro Utama	1.535.089.307,00	766.741.232,25	768.348.074,75
Kredit Konstruksi	1.798.671.999,00	476.504.565,50	1.322.167.433,50
Kredit Modal Usaha	332.113.098,00	163.935.096,03	168.178.001,97
Kredit Umum	54.878.167,00	27.439.083,00	27.439.084,00
TOTAL	5.424.391.902,00	2.206.070.356,23	3.218.321.545,77

Untuk lebih meningkatkan pendapatan subrogasi, Perseroan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan *update* data subrogasi setiap bulan secara rutin.
2. Melakukan rekonsiliasi data subrogasi secara periodik dengan kantor cabang Penerima Jaminan (Bank dan Non Bank) terkait minimal setiap 3 bulan, baik melalui surat maupun *on the spot* di lapangan.
3. Melakukan penagihan kepada debitur secara bersama-sama dengan Penerima Jaminan (Bank dan Non Bank) secara optimal.
4. Menginventarisasi data agunan debitur khususnya untuk kasus tertentu dimana proses pembayaran dirasa cukup sulit atau nasabah tidak sanggup lagi untuk melakukan pembayaran, dan bekerjasama dengan Penerima Jaminan (Bank dan Non Bank) untuk melakukan penjualan agunan baik melalui proses lelang maupun melalui Lembaga yang ditunjuk oleh Penerima Jaminan (Bank dan Non Bank).
5. Terkait point 4 diatas, diupayakan mencari pembeli khusus untuk agunan-agunan yang dalam proses penjualan secara sukarela oleh terjamin.

Strategi subrogasi kedepan adalah meningkatkan kegiatan monitoring dan penagihan piutang subrogasi serta menerapkan pola insentif (*Collecting fee*) kepada mitra yang melakukan penagihan subrogasi kepada terjamin sesuai anggaran yang telah disediakan, serta bekerja sama dengan pihak ke 3 (perusahaan profesional yang bergerak dalam usaha penagihan subrogasi) sehingga pendapatan subrogasi dapat ditingkatkan.

3.4 Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) dipandang oleh Perseroan sebagai salah satu unsur Perseroan yang sangat berharga dan sangat penting dalam proses kegiatan usaha. Memahami pentingnya peran SDM bagi Perseroan, maka *Competency Based Human Resources Management (CBHRM)* diterapkan manajemen dalam proses perekrutan, penempatan, dan pembinaan.

Pada tahun 2019, Perseroan kembali merekrut tenaga SDM berpengalaman guna mendukung operasional Perseroan. Hal ini didasarkan pada kebutuhan Perseroan dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2019. Selain itu, Perseroan juga melakukan promosi SDM dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan.



Dalam melakukan aktivitas operasionalnya, Perseroan saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 46 (empat puluh enam) orang dengan klasifikasi:

- 3 (*tiga*) orang Dewan Komisaris;
- 2 (*dua*) orang Dewan Pengawas Syariah;
- 3 (*tiga*) orang Direksi;
- 29 (*dua puluh sembilan*) orang Karyawan Tetap; dan
- 9 (*sembilan*) orang Karyawan Kontrak Waktu Tertentu (KKWT).

Adapun perubahan jumlah karyawan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun beroperasionalnya Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut:

PT JAMKRIDA JABAR
PERUBAHAN JUMLAH SDM
TAHUN 2018 DAN 2019

JABATAN	JUMLAH	
	2018	2019
Dewan Komisaris	2	3
Dewan Pengawas Syariah	2	2
Direksi	3	3
Kepala Divisi	3	3
Kepala Bagian	4	4
Staf	22	22
Karyawan Kontrak (KKWT)	9	9
TOTAL	45	46

Pada tahun 2019 jumlah SDM Perseroan bertambah 1 (satu) orang menjadi 46 (empat puluh enam) orang yang sebelumnya berjumlah 45 (empat puluh lima) orang di tahun 2018. Perubahan jumlah SDM ini terjadi karena adanya perekrutan 1 (satu) orang komisaris (komisaris independen) sebagai upaya pemenuhan ketentuan OJK.

Seperti periode-periode sebelumnya, Perseroan terus melakukan pengembangan kompetensi SDM guna mencapai hasil kerja yang berbasis pada kinerja (performance target) yang telah ditetapkan. Pengembangan kompetensi SDM tersebut dilaksanakan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan job description dari setiap SDM seperti short course, seminar, workshop dan pelatihan lainnya. Pengembangan kompetensi SDM ini diharapkan dapat memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan dari setiap SDM sesuai dengan visi dan misi Perseroan.

Adapun program Pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti SDM Perseroan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Agenda Pendidikan & Pelatihan	Waktu Kegiatan	Penyelenggara Kegiatan	Peserta
1	Training Business Intelligence	11-13 Februari 2019	Expertindo Training & Consulting	Sekretaris Perusahaan
2	Program Sertifikasi Kelas Eksekutif CRGP	19-20 Februari 2020	PT RAP Indonesia	Komisaris Utama & Direktur Keuangan
3	Pelatihan Menghitung Pajak Kini & Pajak Tangguhan: Persiapan Audit Laporan Keuangan & Persiapan SPT PPH Badan	22 Februari 2019	Ikatan Akuntan Indonesia	Direktur Utama, Kadiv. Keuangan, Staf SPI dan Staf Akunting
4	Key Risk Indicators	27 Februari - 1 Maret 2019	CRMS Indonesia	Staf Manajemen Risiko
5	Pelatihan Sekretaris Arbitrase dan Mediasi Lembaga Alternative Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan	27-28 Februari 2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Direktur Utama
6	Human Capital Management Certification Modul I : Aligning HCM Strategy An Corporate Strategy	12-15 Maret 2019	PPM Manajemen	Kadiv. Keuangan
7	Sertifikasi CRMP (Certified Risk Management Profesional)	25-29 Maret 2019	PT RAP Indonesia	Kabag. Klaim & Subrogasi
8	Program Sertifikasi CRGP	9-10 April 2019	PT RAP Indonesia	Direktur Operasional
9	IAI - AFA - IAESB International Conference 2019	11-12 April 2019	Ikatan Akuntan Indonesia	Direktur Utama & Direktur Keuangan

No	Agenda Pendidikan & Pelatihan	Waktu Kegiatan	Penyelenggara Kegiatan	Peserta
10	Training Investasi Bahana TCW 2019	23-24 April 2019	PT Bahana TCW Investment Management	Kadiv. Keuangan dan Umum & Staf Investasi
11	Seminar Peranan Pasar Saham dan Pasar Surat Utang Untuk Membantu Pertumbuhan Perusahaan	25 April 2019	PT Pefindo	Kadiv. Keuangan dan Umum & Staf Investasi
12	CRMO (Certified Risk Management Officer)	23 - 26 April 2019	PT RAP Indonesia	Staf Klaim & Subrogasi
13	Pelatihan Program Re-sertifikasi Enterprise Risk Management Academy (ERMA)	22 April 2019	CRMS Indonesia	Komisaris
14	Sertifikasi CRGP (Certified Risk Governance Profesional)	23-24 April 2019	PT RAP Indonesia	Kadiv. Manajemen Risiko & Klaim
15	Pelatihan Risk Management	25-26 Juli 2019	CV Berdiklat/HRD Spot	Staf Klaim & Subrogasi
16	Workshop ICAbM 2019	31 Juli 2019	IAI Wilayah Jawa Barat	Staf Perencanaan Perusahaan
17	Workshop Update PSAK Terbaru Untuk Bahan Ajar Akuntansi Keuangan	15-16 Agustus 2019	IAI Wilayah Jawa Barat	Kadiv. Keuangan dan Umum & Staf Akunting
18	Workshop Pra Itjima Sanawi (Annual Meeting) DPS	19 September 2019	Dewan Syariah Nasional MUI	Dewan Pengawas Syariah
19	Training Program Mikrotik	16-20 September 2019	PT Netkrom Solution	Staf Senior IT

No	Agenda Pendidikan & Pelatihan	Waktu Kegiatan	Penyelenggara Kegiatan	Peserta
20	Seminar Manajemen Risiko	25 September 2019	CRMS Indonesia	Staf Manajemen Risiko
21	GCG BUMD Provinsi Jabar dan Workshop One On One Meeting dengan IFC	8-9 Oktober 2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Dewan Komisaris, Direksi, Staf SPI & Sekretaris Perusahaan
22	Sertifikasi BNSP Bidang SDM Level Staf, CHRO (Certified Human Resource Officer)	15-19 Oktober 2019	BNSP	Staf SDM
23	Pelatihan Building Corporate Culture	24 - 25 Oktober 2019	PT Kreatif Indonesia Satu	Sekretaris Perusahaan
24	Training Manajemen dan Analisis Portofolio Investasi	28-29 Oktober 2019	SH Consultant	Staf Investasi
25	RSKKNi Bidang Penjaminan dan RDP atas Peraturan Mengenai Lembaga Penjamin	31 Oktober – 1 November 2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Direksi, Kadiv., Sekretaris Perusahaan & Senior Staf Legal
26	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VII-2019	28-29 November 2019	LSPMR	Dewan Komisaris, Direksi, Kadiv. Manajemen Risiko dan Klaim & Kabag Klaim dan Subrogasi
27	Certified Human Resources Performance & Development (CHRPD)	30 November 2019	PT Care Indonesia Solusi (Bina Karir)	Staf SDM

3.5 Aspek Umum

Sebagai bagian *supporting* yang menunjang kebutuhan dan sarana prasarana dari divisi-divisi lain dalam menjalankan operasional, maka berikut ini adalah capaian yang dilakukan oleh bagian umum PT Jamkrida Jabar pada tahun 2019:

1. Pengelolaan Inventaris Kantor.
 - a. Gedung dan aset-aset di dalamnya.
 - b. Kendaraan inventaris kantor.
 - c. Pengadaan kebutuhan karyawan seperti ATK, seragam, dan lain-lain.
2. Penertiban Administrasi.
 - a. Penertiban administrasi kantor.
 - b. Penertiban pengarsipan dokumen kantor.
3. Mengadakan renovasi gedung kantor.
4. Menyediakan sarana prasarana dalam penyelenggaraan RUPS untuk Tahun Buku 2018 & RUPS LB 2019 pengesahan RKAP tahun 2020.
5. Mempersiapkan sarana prasarana kebutuhan beberapa pameran, diantaranya:
 - a. Business Coaching Dinas KUMKM Kota Bandung.
 - b. Festival Wirausaha baru Tahun 2019.

Dalam melaksanakan tugasnya, bagian umum mengelola belanja modal Perseroan. Adapun realisasi belanja modal selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

PT JAMKRIDA JABAR LAPORAN BELANJA MODAL PER 31 DESEMBER 2019

dalam jutaan rupiah

BELANJA MODAL	RKAP 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN
Bangunan	140	112	80,00%
Inventaris	393	302	76,90%
Kesisteman	390	308	78,97%
JUMLAH	923	722	78,25%

Berdasarkan tabel diatas, Perseroan merealisasikan belanja modal sebesar 78,25% atau senilai Rp722 juta dari anggaran senilai Rp923 juta. Pengeluaran Belanja Modal disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

3.6 Aspek Teknologi dan Kesisteman

Untuk tahun 2019 secara garis besar bagian IT Perseroan sudah merencanakan program kerja sebagai berikut:

1. *Support* IT keseluruhan (*software, hardware, jaringan dan internet*).
2. *Monitoring dan maintenance Database* Penjaminan dan keuangan.
3. Pembuatan sistem Manajemen IJP *Accrual Basis* Syariah.
4. Pembuatan sistem informasi *inventory* dan gudang.
5. Peningkatan dan *Upgrading Server Database*.
6. Pemeliharaan sistem *Firewall Internet* dan jaringan LAN.
7. *Upgrading* modul-modul sistem Informasi Penjaminan, Klaim, Subrogasi, Pengendalian dan Keuangan.
8. Integrasi dan konsolidasi sistem Konvensional dan Syariah.
9. *Upgrading* sistem penjaminan (*surety bond*) sesuai dengan kebutuhan dan permintaan *user* terkait.

3.7 Aspek Pengawasan

Sebagai organ pendukung Perseroan dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan untuk dapat meningkatkan nilai tambah bagi *stakeholders*, yaitu suatu kaidah, norma ataupun praktik bisnis yang sehat dan beretika. Dalam penerapannya, tata kelola perusahaan yang baik memerlukan praktik pengawasan yang mengacu pada prinsip GCG.

Dalam mewujudkan GCG, SPI memiliki beberapa peran, diantaranya:

1. sebagai pengawas independen yang melakukan audit, evaluasi dan menilai operasional dan aktivitas perusahaan;

2. sebagai katalisator dan konsultan dalam hal-hal tertentu bagi Direksi dan manajemen yang berkaitan dengan praktik manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan praktik GCG serta dalam upaya meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan secara berkelanjutan.

Unit Satuan Pengawasan Internal (SPI) Perseroan merupakan aparat pengawas (auditor) internal Perusahaan yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.

Hal-hal yang telah dilakukan Unit Satuan Pengawasan Internal (SPI) Perseroan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan audit internal sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan.
2. Penyusunan pedoman GCG.
3. Penyusunan laporan Penerapan GCG.
4. Penyusunan SOP Audit.
5. Melakukan review SOP.
6. *Counterpart* dengan auditor eksternal (KAP dan OJK).

UNIT USAHA SYARIAH



BAB IV

UNIT USAHA SYARIAH

Setelah memperoleh izin pembentukan dari OJK No. KEP-4/NB.223/2015 tanggal 3 Februari 2015 dan mulai menjalankan produksinya pada bulan Mei 2015, Unit Usaha Syariah menjadi bukti komitmen Perseroan dalam mengembangkan bisnis penjaminan.

Unit Usaha Syariah ini berjalan dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama *Kafalah* Pembiayaan (Penjaminan Kredit) dengan Bank BJB Syariah pada tanggal 4 Mei 2015, dan berlanjut dengan ditandatanganinya beberapa kerja sama *kafalah* pembiayaan dengan lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank lainnya.

Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar dipimpin oleh Kepala Unit Usaha Syariah dan dibina oleh dua orang Dewan Pengawas Syariah yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta telah lolos Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.

Sebagai sarana penunjang operasionalnya, Unit Usaha syariah PT Jamkrida Jabar telah membangun Sistem Informasi *Kafalah* berbasis *web*. Dimana sistem tersebut dapat menampilkan data Penjaminan, Klaim, dan Subrogasi secara *up to date*. Selain itu, dalam sistem informasi tersebut juga dapat ditampilkan perhitungan *gearing ratio*, *regaransi*, dan *bussiness recovery program*. Di masa yang akan datang sistem ini direncanakan akan terintegrasi dengan Sistem Informasi Keuangan.

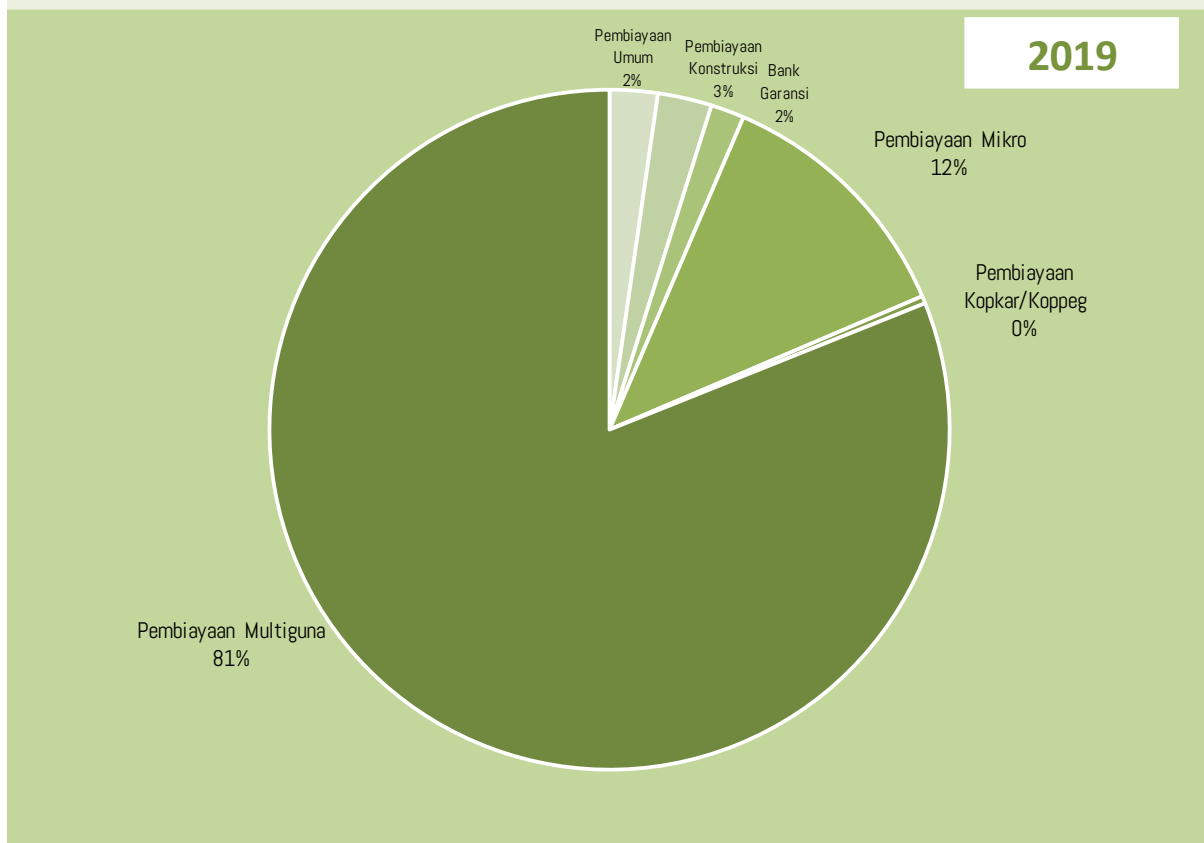
Dengan modal awal pendirian senilai Rp15 miliar dan penambahan modal senilai Rp10 miliar, Unit Usaha Syariah sampai dengan 31 Desember 2019 telah menjamin pembiayaan senilai Rp1,81 triliun dengan memperoleh Imbal Jasa Kafalah senilai Rp24,51 miliar, dengan 50.076 terjamin, dimana 29.279 diantaranya merupakan KUMKM.

Adapun kinerja Unit Usaha Syariah selama periode 2019 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

VOLUME KAFALAH TAHUN 2018 DAN 2019

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	REALISASI 2018	RKAP 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	GROWTH 2018-2019
Per Pembiayaan					
Produktif	129.863,61	171.939,52	109.090,64	63,45%	-16,00%
Non Produktif	377.880,10	563.502,01	456.106,41	80,94%	20,70%
Total	507.743,72	735.441,53	565.197,05	76,85%	11,32%
Per Produk					
Pembiayaan Umum	9.312,90	13.588,67	12.833,47	94,44%	37,80%
Pembiayaan Konstruksi	45.052,32	58.658,73	14.464,00	24,66%	-67,90%
Bank Garansi	14.470,89	19.431,56	8.962,73	46,12%	-38,06%
Pembiayaan Mikro	45.044,34	52.048,04	68.275,86	131,18%	51,57%
Pembiayaan Kopkar/Koppeg	-	-	2.000,00		
Pembiayaan Multiguna	377.880,10	563.502,01	456.106,41	80,94%	20,70%
Surety Bond	15.983,16	28.212,52	2.554,58	9,05%	-84,02%
Total	507.743,72	735.441,53	565.197,05	76,85%	11,32%



Jumlah KUMKM Terjamin: 31.639

Jumlah Tenaga Kerja Terserap: 11.555

LAPORAN VOLUME IJK CASH BASIS
PT JAMKRIDA JABAR (UNIT USAHA SYARIAH)
TAHUN 2018 DAN 2019

dalam jutaan rupiah

URAIAN	REALISASI 2018	RKAP 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	GROWTH 2018-2019
	1	2	3	4 = 3/2	5 = (3-1)/1
Per Pembiayaan					
Produktif	1.541,59	2.070,27	1.548,21	74,78%	0,43%
Non Produktif	5.270,47	8.001,86	6.819,23	85,22%	29,39%
Jumlah	6.812,06	10.072,13	8.367,44	83,08%	22,83%
Per Produk					
Pembiayaan Umum	335,58	448,79	440,04	98,05%	31,13%
Pembiayaan Konstruksi	424,40	569,18	146,12	25,67%	-65,57%
Bank Garansi	124,83	179,29	70,87	39,53%	-43,23%
Pembiayaan Mikro	480,94	566,60	831,61	146,77%	72,91%
Pembiayaan Kopkar/Koppe	-	-	30,44		
Pembiayaan Multiguna	5.270,47	8.001,86	6.819,23	85,22%	29,39%
Surety Bond	175,84	306,42	29,13	9,51%	-83,43%
Jumlah	6.812,06	10.072,13	8.367,44	83,08%	22,83%

LAPORAN VOLUME IJK ACCRUAL BASIS
PT JAMKRIDA JABAR (UNIT USAHA SYARIAH)
TAHUN 2018 DAN 2019

dalam jutaan rupiah

URAIAN	REALISASI 2018	RKAP 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	GROWTH 2018-2019
	1	2	3	4 = 3/2	5 = (3-1)/1
Per Pembiayaan					
Produktif	1.346,25	1.237,57	1.362,25	110,07%	1,19%
Non Produktif	2.549,27	3.472,75	3.271,90	94,22%	28,35%
Jumlah	3.895,52	4.710,32	4.634,15	98,38%	18,96%
Per Produk					
Pembiayaan Umum	340,21	339,04	380,15	112,12%	11,74%
Pembiayaan Konstruksi	375,71	482,45	213,93	44,34%	-43,06%
Bank Garansi	126,67	175,48	83,72	47,71%	-33,91%
Pembiayaan Mikro	332,63	201,08	655,03	325,75%	96,93%
Pembiayaan Kopkar/Koppe	-	-	9,17		
Pembiayaan Multiguna	2.549,27	3.472,75	3.271,90	94,22%	28,35%
Surety Bond	171,04	39,52	20,25	51,25%	-88,16%
Jumlah	3.895,52	4.710,32	4.634,15	98,38%	18,96%

Berdasarkan data diatas, volume *kafalah* pembiayaan Unit Usaha Syariah tahun 2019 terealisasi senilai Rp565,20 miliar atau hanya tercapai 76,85% dari RKAP 2019, namun mengalami peningkatan sebesar 11,32% dari tahun 2018 senilai Rp507,74 miliar. Realisasi volume IJK *cash basis* adalah senilai Rp8,37 miliar atau hanya tercapai 83,08% dari RKAP 2019 senilai Rp10,07 miliar, sedangkan realisasi volume IJK *accrual basis* adalah senilai Rp4,63 miliar atau hanya tercapai 98,38% dari RKAP 2019 senilai Rp4,71 miliar.

Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian kinerja Unit Usaha Syariah tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Kontribusi *Kafalah* pembiayaan konstruksi dan bank garansi hanya diperoleh dari bank bjb Syariah yang belum optimal dikarenakan banyak nasabah *eksisting* yang beralih (kembali) menggunakan jasa bank bjb. Salah satu penyebabnya disinyalir adalah lambannya proses pencairan/realisasi di bjb Syariah diakibatkan adanya perubahan kebijakan di internal bjb Syariah dimana KCP hanya melayani skim pembiayaan konsumtif/multiguna saja, sedangkan untuk proposal pengajuan skim produktif (termasuk pembiayaan umum) harus diteruskan ke KC di atasnya sehingga KCP-KCP bjb Syariah kalah bersaing dengan KC-KC bank bjb.
- Realisasi *Kafalah* pembiayaan umum tumbuh sebesar 37,80% dibandingkan dengan tahun 2018, namun target hanya tercapai sebesar 98,05%. Penyebabnya adalah melambatnya penyaluran pembiayaan umum (modal usaha kepada UKM) di beberapa mitra BPRS akibat merangkaknya rasio NPF. Selain itu tidak semua segmen pembiayaan umum dibagi risikonya oleh bank kepada mitra Asuransi/Penjaminan dengan alasan masih ter-*cover* oleh agunan dan adanya permintaan perluasan *coverage* yaitu menjamin risiko jiwa untuk nasabah/debitur perorangan yang belum dapat dipenuhi dengan alasan regulasi dan perseroan belum memiliki mitra *co-branding* (Asuransi Jiwa).
- Kontribusi Skim Surety Bond masih sangat rendah disebabkan oleh rendahnya aktivitas pemasaran dan sosialisasi penjaminan proyek ke asosiasi-asosiasi jasa konstruksi dan atau jasa konsultasi serta OPD-OPD di lingkungan Pemprov Jabar dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat karena sinyalemen bahwa mayoritas proyek-proyek APBD/APBN dipersyaratkan jaminan berbentuk Bank Garansi. Sedangkan Surety Bond untuk proyek-proyek swasta cenderung masih dihindari.
- Meski tumbuh sebesar 29,39% dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi *Kafalah* pembiayaan multiguna hanya tercapai sebesar 80,94%. Penyebab utamanya adalah masuknya beberapa pesaing baru (Asuransi/Penjaminan berskala nasional) khususnya pada mitra BPRS sehingga dilakukan kebijakan *risk & market sharing*. Selain itu terdapat TC PKS yang belum akomodatif atau dinamis terhadap kebutuhan mitra akibat batasan regulasi (seperti : kewajiban pemenuhan nilai penjaminan bagi usaha produktif) ataupun *risk appetite* manajemen (membatasi diri).

Dalam upaya meningkatkan pendapatan, strategi Unit Usaha Syariah pada tahun 2019 mulai mengembangkan bisnis ke penjaminan secara langsung yaitu *Surety Bond*. Disamping itu, Unit Usaha Syariah tetap fokus pada pengembangan penjaminan secara tidak langsung baik *cash loan* maupun *non cash loan* melalui kerja sama *kafalah* dengan lembaga keuangan baik bank maupun non bank, seperti:

- Kafalah Pembiayaan Mikro
- Kafalah Pembiayaan Umum
- Kafalah Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang dan atau Jasa
- Kafalah Pembiayaan Konsumtif (Multiguna)
- Kafalah Bank Garansi (Kontra Bank Garansi)

PROSPEK DAN PENGEMBANGAN USAHA



BAB V

PROSPEK DAN PENGEMBANGAN USAHA

Dalam mendorong pengembangan usaha penjaminan kredit, Perseroan akan terus berupaya memperluas jaringan pemasaran dan kemitraan dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Perseroan menggunakan konsep *Market Driven* dalam memetakan pasar-pasar yang potensial (baik wilayah maupun mitra kerja), mengidentifikasi kebutuhan pasar (mitra kerja), mengumpulkan dan meng-*update* kondisi pasar termasuk pesaing. Hal-hal tersebut akan menunjang kelengkapan dan akurasi data yang diperlukan dalam membuat profil risiko dan kebijakan yang akan diambil.

Selain itu, Perseroan akan meng-*update* dan me-*review* *Standard Operating Procedures* (SOP) Penjaminan maupun Perjanjian-perjanjian Kerja Sama disesuaikan dengan kondisi pasar, evaluasi kerja sama resiprokak secara periodik, membuka peluang kerja sama penjaminan bersama (*Co-Guarantee*) dengan perusahaan penjaminan lain, membuka peluang kerja sama produk (*Co-Branding*) dengan perusahaan asuransi, melakukan *gathering* dan sosialisasi bisnis penjaminan, dan *upgrade* sistem informasi.

Pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah yang menyatakan bahwa "*Tahun 2018 dan seterusnya: Rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap Total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 20%*". Hal tersebut merupakan peluang bagi Perseroan untuk meningkatkan peran serta dalam pengembangan sektor produktif sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

KEBIJAKAN DIVIDEN



BAB VI

KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan yang dilakukan perusahaan terkait dengan laba bersih perusahaan adalah:

1. Sesuai dengan POJK Nomor 6/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penjaminan, pada Pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa "Lembaga Penjaminan wajib memiliki cadangan umum paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari laba bersih atau selisih hasil usaha pada tiap akhir periode laporan tahunan".
2. Sebagai entitas yang relatif masih baru, PT Jamkrida Jabar tentunya membutuhkan permodalan yang relatif besar untuk menjaga likuiditasnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, yang menyatakan bahwa Lembaga Penjaminan wajib menjaga likuiditasnya dengan rasio paling sedikit 150%.
3. Selain dari hal tersebut, hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan juga menjadi salah satu dasar Perseroan dalam menyusun kebijakan dividen dan menyusun kebijakan penggunaan laba bersih Perseroan.



RENCANA DAN STRATEGI BISNIS TAHUN 2020

BAB VII

RENCANA DAN STRATEGI BISNIS TAHUN 2020

Sasaran utama dalam rencana jangka panjang dan strategi Perseroan adalah peningkatan jumlah terjamin/debitur di sektor produktif (KUMKM) di Jawa Barat sebagai bagian dari implementasi janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dengan tetap memperhatikan prinsip bisnis penjaminan, yaitu *prudent*, *profitable*, dan berdaya guna serta berbasis risiko. Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut, maka Perseroan perlu melakukan langkah-langkah strategis diantaranya adalah:

- Mengoptimalkan penetrasi pasar kepada BPR dan Bank Umum (Buku I dan Buku II) dalam lingkup wilayah provinsi Jawa Barat dan Nasional baik yang eksisting maupun mitra baru, khususnya untuk penjaminan produktif, dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis web yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja perseroan;
- Melakukan usulan perubahan perda pendirian terkait dengan kategori terjamin, wilayah operasional dan modal dasar perseroan serta perda penyertaan modal terkait perubahan batasan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan/atau melakukan inisiasi penawaran saham dalam portepel kepada pihak lain (selain pemegang saham eksisting);
- Bersinergi dengan perusahaan penjaminan dan/atau asuransi lain untuk mengembangkan produk dan wilayah penjaminan berbasis *risk and profitability*;
- Melakukan optimalisasi produk-produk penjaminan yang telah mendapatkan izin dari regulator;
- Mempromosikan dan mensosialisasikan produk penjaminan kepada calon mitra baru melalui media cetak dan elektronik;
- Mengoptimalkan unit usaha syariah melalui kerjasama dengan mitra baru yang berbasis syariah;
- Menjaga keseimbangan komposisi penjaminan produktif dan konsumtif sesuai dengan regulasi sekurang-kurangnya dengan perbandingan 1:4;
- Sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, pelayanan kepada mitra merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan Perseroan;
- Dalam menghadapi persaingan yang semakin tinggi dan kompleksitas pengelolaan data di lingkungan internal, perusahaan dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi;

- Pengawasan dalam pengelolaan anggaran perusahaan secara periodik agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- Menerapkan investasi pada mitra strategis dengan prinsip aman dan menguntungkan serta mengedepankan kerjasama resiprokal;
- Penggunaan sistem akuntansi yang terintegrasi dengan bagian penjaminan sehingga penyajian laporan keuangan dapat dilakukan dengan efektif, efisien, dan akuntabel;
- Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM melalui program-program pelatihan yang dilaksanakan;
- Membuat kajian dan kebijakan terkait dengan mitigasi risiko terhadap semua produk yang akan dipasarkan oleh perusahaan;
- Melakukan optimalisasi pendapatan subrogasi.

RENCANA DAN STRATEGI BISNIS TAHUN 2020

ROADMAP STRATEGI DAN OPERASIONAL PERSEROAN



RENCANA KERJA TAHUN 2020



BAB VIII

RENCANA KERJA TAHUN 2020

Kemampuan Perseroan yang tetap mampu membukukan laba pada akhir tahun 2019 dengan situasi dan kondisi yang awalnya diprediksi tidak akan mampu membukukan laba, membuat Perseroan merasa optimis terhadap target yang telah disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020.

Pada tahun 2020, Perseroan menargetkan pencapaian operasional mengalami peningkatan rata-rata sebesar 20% dan membukukan laba senilai Rp5,31 miliar. Dengan kata lain, Perseroan menargetkan dapat membukukan laba dengan peningkatan 39,21% di tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini merupakan semangat positif yang perlu terus dijaga oleh Perseroan.

Unit Usaha Syariah (UUS) yang terus memberikan kontribusi positif kepada Perseroan sejak diresmikan pada bulan Februari 2015, mendorong Perseroan untuk terus meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja dari UUS, mengingat potensi pasar UUS yang masih sangat besar baik di wilayah Jawa Barat maupun diluar wilayah Jawa Barat.

Adapun beban operasional dan non operasional yang ditargetkan dalam RKAP 2020, Perseroan masih menargetkan nilai-nilai yang masih dalam tahap wajar dan terukur.

Asumsi-asumsi makro yang digunakan dalam penyusunan RKAP 2020 adalah sebagai berikut:

URAIAN	ASUMSI
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (<i>yoy</i>)	5,3%*
Laju Inflasi (<i>yoy</i>)	3,1% - 4,5%*
Nilai Tukar Rupiah per USD	Rp14.400,-*
BBM Non-Subsidi (Pertamax)	Rp10.400,-/liter**
Suku Bunga Acuan	5,4%*

* Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN 2020

** Sumber: *Website* Resmi Pertamina

Asumsi-asumsi mikro yang digunakan dalam penyusunan RKAP 2020 adalah sebagai berikut:

URAIAN	ASUMSI	KETERANGAN
Kenaikan Volume Penjaminan	12,61%	Dari Prognosa 2019
Kenaikan Beban Klaim	15%	Dari Prognosa 2019
Komisi Agen/Broker	15% - 20%	Kecuali kredit Mikro
Cadangan Klaim	0%	
<i>Management Fee</i> dari Regaransi	10%	Dari IJP Regar Cash Basis
Bunga Deposito	6,25% - 7,5%	
Kenaikan Beban Operasional	43%	Dari Prognosa 2019
Kenaikan Beban SDM	18%	Dari Prognosa 2019
Kenaikan Beban Administrasi & Umum	44%	Dari Prognosa 2019

PT JAMKRIDA JABAR

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019 DAN RKAP 2020

dalam jutaan rupiah

	31 DES 2019	RKAP 2020	Growth
PENDAPATAN PENJAMINAN			
Imbal Jasa Penjaminan	47.732,91	57.601,53	20,67%
Beban Akuisisi	(6.835,63)	(9.227,22)	34,99%
Restitusi IJP	(1.773,30)	-	-100,00%
Manajemen Fee	3.219,84	5.377,78	67,02%
JUMLAH PENDAPATAN PENJAMINAN	42.343,82	53.752,10	26,94%
BEBAN KLAIM			
Beban Klaim	(22.636,37)	(25.108,13)	10,92%
Beban (Pemulihan) Cadangan Klaim	(858,42)	-	100,00%
Beban Regaransi	(14.268,88)	(18.026,62)	26,34%
JUMLAH BEBAN KLAIM	(37.763,68)	(43.134,76)	14,22%
PENDAPATAN PENJAMINAN BERSIH	4.580,13	10.617,34	131,81%
PENDAPATAN INVESTASI	14.935,39	16.765,46	12,25%
PENDAPATAN SUBROGASI	3.218,32	2.526,11	-21,51%
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	(2.379,18)	(3.084,09)	29,63%

BEBAN USAHA

Beban Operasional	(2.001,36)	(2.548,61)	27,34%
Beban Sumber Daya Manusia	(11.415,12)	(13.770,00)	20,63%
Beban Administrasi dan Umum	(3.422,31)	(5.465,00)	59,69%
JUMLAH BEBAN USAHA	(16.838,79)	(21.783,61)	29,37%

LABA SEBELUM PAJAK	3.515,88	5.041,20	43,38%
---------------------------	-----------------	-----------------	---------------

BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Beban Pajak Kini	-	-	0,00%
Manfaat Pajak tangguhan	392,04	304,95	-22,21%
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN	392,04	304,95	22,21%

LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	3.907,91	5.346,15	36,80%
-----------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF	(67,54)	-	0,00%
--	----------------	----------	--------------

LABA KOMPREHENSIF	3.840,37	5.346,15	39,21%
--------------------------	-----------------	-----------------	---------------

PT JAMKRIDA JABAR**LAPORAN POSISI KEUANGAN**

PER 31 DESEMBER 2019 DAN RKAP 2020

dalam jutaan rupiah

	31 DES 2019	RKAP 2020	Growth
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	171.333,69	196.908,06	14,93%
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	4.544,90	2.240,51	-50,70%
Beban Dibayar Dimuka	18.522,77	60.622,01	227,28%
Aset Keuangan	35.092,00	67.973,00	93,70%
Properti Investasi	2.472,00	2.472,00	0,00%
JUMLAH ASET LANCAR	231.965,36	330.215,59	42,36%
ASET TETAP			
Aset Tetap	11.699,14	12.419,33	6,16%
JUMLAH ASET TETAP	11.699,14	12.419,33	6,16%
ASET TIDAK LANCAR			
Beban Dibayar Dimuka - Jangka Panjang	94.168,00	103.313,31	9,71%
Aset Keuangan - Jangka Panjang	14.071,25	-	-100,00%
Aset Pajak Tangguhan	7.270,57	7.177,73	-1,28%
Aset Lain-lain	974,84	969,87	-0,51%
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	116.484,65	111.460,90	-4,31%
JUMLAH ASET	360.149,16	454.095,82	26,09%

LIABILITAS DAN EKUITAS**LIABILITAS****LIABILITAS JANGKA PENDEK**

Utang Pajak	383,57	329,56	-14,08%
Utang Re/Cogaransi	4.572,29	1.069,41	-76,61%
Beban Yang Masih Harus Dibayar	898,40	-	-100,00%
Penampungan Sementara	4.008,55	5.849,61	45,93%
Utang Lancar Lainnya	12,89	1.092,62	8373,65%
Pendapatan Diterima Dimuka - Jangka Pendek	32.073,36	63.910,70	99,26%
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	41.949,07	72.251,90	72,24%

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Pendapatan Diterima Dimuka - Jangka Panjang	151.295,08	212.476,87	40,44%
Cadangan Klaim	4.050,46	3.515,04	-13,22%
Liabilitas Imbalan Paska Kerja	1.776,03	579,46	-67,37%
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	157.121,57	216.571,37	37,84%

JUMLAH LIABILITAS	199.070,65	288.823,27	45,09%
--------------------------	-------------------	-------------------	---------------

EKUITAS

Modal	153.200,00	153.200,00	0,00%
Cadangan Umum	4.094,65	6.726,39	64,27%
Saldo Laba (Rugi)	3.907,91	5.346,15	-36,80%
Selisih Nilai Wajar Obligasi	87,16	-	-100,00%
Keuntungan (Kerugian) Pengukuran Kembali	(211,20)	-	-100,00%
Imbalan Pasti Setelah Aset Pajak Tangguhan			
JUMLAH EKUITAS	161.078,51	165.272,55	2,60%

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	360.149,16	454.095,82	26,09%
--------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

LAPORAN VOLUME KREDIT
PT JAMKRIDA JABAR
TAHUN 2019 DAN RKAP 2020

dalam jutaan rupiah

URAIAN	REALISASI 2019			RKAP 2020			GROWTH 2019-2020
	Konvensional	Syariah	Total	Konvensional	Syariah	Total	
	1	2	3 = 1+2	4	5	6 = 4+5	7 = (6-3)/3
Per Kredit							
Produktif	1.794.134,95	148.165,89	1.942.300,85	2.244.744,86	202.707,64	2.447.452,51	26,01%
Non Produktif	3.686.064,05	456.106,41	4.142.170,46	6.020.692,25	611.831,87	6.632.524,12	60,12%
Jumlah	5.480.199,00	604.272,31	6.084.471,31	8.265.437,11	814.539,52	9.079.976,63	49,23%
Per Produk							
Kredit Umum	207.600,00	20.055,00	227.655,00	249.739,45	24.033,62	273.773,07	20,26%
Kredit Konstruksi	690.498,30	18.080,00	708.578,30	830.697,52	42.213,77	872.911,29	23,19%
Bank Garansi	392.949,09	8.962,73	401.911,82	371.345,10	9.810,27	381.155,37	-5,16%
Kredit Mikro	86.399,90	96.513,58	182.913,48	306.640,34	113.227,50	419.867,85	129,54%
Kredit Kopkar/Koppeg	416.687,67	2.000,00	418.687,67	486.322,45	-	486.322,45	16,15%
Kredit Multiguna	3.686.064,05	456.106,41	4.142.170,46	6.020.692,25	611.831,87	6.632.524,12	60,12%
Surety Bond	-	2.554,58	2.554,58	-	13.422,48	13.422,48	425,43%
Jumlah	5.480.199,00	604.272,31	6.084.471,31	8.265.437,11	814.539,52	9.079.976,63	49,23%

LAPORAN VOLUME PENJAMINAN
PT JAMKRIDA JABAR
TAHUN 2019 DAN RKAP 2020

dalam jutaan rupiah

URAIAN	REALISASI 2019			RKAP 2020			GROWTH 2019-2020
	Konvensional	Syariah	Total	Konvensional	Syariah	Total	
	1	2	3 = 1+2	4	5	6 = 4+5	7 = (6-3)/3
Per Kredit							
Produktif	1.532.235,57	109.090,64	1.641.326,21	1.868.804,11	152.773,70	2.021.577,81	23,17%
Non Produktif	3.686.064,05	456.106,41	4.142.170,46	6.020.692,25	611.831,87	6.632.524,12	60,12%
Jumlah	5.218.299,62	565.197,05	5.783.496,67	7.889.496,36	764.605,57	8.654.101,93	49,63%
Per Produk							
Kredit Umum	136.970,00	12.833,47	149.803,47	160.774,60	16.137,84	176.912,44	18,10%
Kredit Konstruksi	516.698,32	14.464,00	531.162,32	621.692,33	33.655,51	655.347,84	23,38%
Bank Garansi	392.949,09	8.962,73	401.911,82	371.345,38	9.810,27	381.155,65	-5,16%
Kredit Mikro	68.930,50	68.275,86	137.206,35	228.669,35	79.747,59	308.416,94	124,78%
Kredit Kopkar/Koppeg	416.687,67	2.000,00	418.687,67	486.322,45	-	486.322,45	16,15%
Kredit Multiguna	3.686.064,05	456.106,41	4.142.170,46	6.020.692,25	611.831,87	6.632.524,12	60,12%
Surety Bond	-	2.554,58	2.554,58	-	13.422,48	13.422,48	425,43%
Jumlah	5.218.299,62	565.197,05	5.783.496,67	7.889.496,36	764.605,57	8.654.101,93	49,63%

LAPORAN IJP CASH BASIS
PT JAMKRIDA JABAR
TAHUN 2019 DAN RKAP 2020

dalam jutaan rupiah

URAIAN	REALISASI 2019			RKAP 2020			GROWTH 2019-2020
	Konvensional	Syariah	Total	Konvensional	Syariah	Total	
	1	2	3 = 1+2	4	5	6 = 4+5	7 = (6-3)/3
Per Kredit							
Produktif	20.834,86	1.548,21	22.383,07	30.427,92	2.078,66	32.506,58	45,23%
Non Produktif	107.023,94	6.819,23	113.843,18	119.680,00	8.347,11	128.027,11	12,46%
Jumlah	127.858,80	8.367,44	136.226,24	150.107,92	10.425,78	160.533,69	17,84%
Per Produk							
Kredit Umum	3.376,07	440,04	3.816,11	4.565,63	608,11	5.173,74	35,58%
Kredit Konstruksi	5.847,65	146,12	5.993,77	6.898,75	309,18	7.207,93	20,26%
Bank Garansi	3.269,46	70,87	3.340,33	3.031,03	81,15	3.112,17	-6,83%
Kredit Mikro	2.645,86	831,61	3.477,47	9.286,04	930,72	10.216,75	193,80%
Kredit Kopkar/Koppeg	5.695,81	30,44	5.726,25	6.646,48	-	6.646,48	16,07%
Kredit Multiguna	107.023,94	6.819,23	113.843,18	119.680,00	8.347,11	128.027,11	12,46%
Surety Bond	-	29,13	29,13	-	149,51	149,51	413,20%
Jumlah	127.858,80	8.367,44	136.226,24	150.107,92	10.425,78	160.533,69	17,84%

LAPORAN IJP ACCRUAL BASIS
PT JAMKRIDA JABAR
TAHUN 2019 DAN RKAP 2020

dalam jutaan rupiah

URAIAN	REALISASI 2019			RKAP 2020			GROWTH 2019-2020
	Konvensional	Syariah	Total	Konvensional	Syariah	Total	
	1	2	3 = 1+2	4	5	6 = 4+5	7 = (6-3)/3
Per Kredit							
Produktif	16.947,44	1.362,25	18.309,69	17.098,43	1.289,16	18.387,60	0,43%
Non Produktif	24.378,02	3.271,90	27.649,92	35.059,18	4.017,19	39.076,38	41,33%
Jumlah	41.325,46	4.634,15	45.959,61	52.157,62	5.306,35	57.463,97	25,03%
Per Produk							
Kredit Umum	2.082,22	380,15	2.462,37	2.454,74	387,69	2.842,43	15,43%
Kredit Konstruksi	6.231,41	213,93	6.445,35	6.069,10	257,22	6.326,32	-1,85%
Bank Garansi	3.231,00	83,72	3.314,72	2.871,42	78,19	2.949,61	-11,01%
Kredit Mikro	4.141,24	655,03	4.796,27	3.279,70	377,77	3.657,46	-23,74%
Kredit Kopkar/Koppeg	1.261,56	9,17	1.270,73	2.423,49	10,08	2.433,57	91,51%
Kredit Multiguna	24.378,02	3.271,90	27.649,92	35.059,18	4.017,19	39.076,38	41,33%
Surety Bond	0,01	20,25	20,26	-	178,21	178,21	779,62%
Jumlah	41.325,46	4.634,15	45.959,61	52.157,62	5.306,35	57.463,97	25,03%

note : *nilai anggaran dan realisasi telah dikurangi nilai restitusi

TATA KELOLA PERSEROAN



BAB IX

TATA KELOLA PERSEROAN

9.1 Tata Kelola Perseroan

Bagi Jamkrida Jabar, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan, namun merupakan elemen fundamental yang mengacu pada *international best practices* untuk keberlangsungan bisnis yang sehat dan *sustain* dalam jangka panjang. Penerapan GCG yang baik dan komprehensif di beberapa industri dan perusahaan terbukti telah memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan nilai perusahaan (*value creation*) dan telah memberikan manfaat nyata bagi masing-masing industri dan Perseroan, antara lain meningkatnya daya saing dan kinerja perusahaan serta kepercayaan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik investor lokal maupun luar negeri.

Untuk mencapai hal tersebut, tentunya dibutuhkan komitmen bersama seluruh jajaran Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan pegawai Jamkrida Jabar untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan bisnis penjaminan, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.

Perusahaan percaya bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktik-praktik GCG yang konsisten akan memberikan manfaat, baik bagi Perusahaan maupun para Pemangku Kepentingan, yaitu dengan :

1. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Perusahaan.
2. Meningkatkan kinerja Perusahaan, efisiensi, manajemen dan pelayanan kepada para Pemangku Kepentingan.
3. Melindungi Perusahaan dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum

4. Menghindari terjadinya benturan kepentingan antara Dewan Komisaris, DPS, Direksi dan Pemegang Saham dengan Perusahaan.

9.2 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

A. Profil Direksi

No	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarganegaraan
1.	Tri Budhi Muljawan	Direktur Utama	Keputusan Dewan Komisiner OJK 15-09-2014 No.:KEP-2333/NB.1/2014	Akta No 01 Tanggal 31 Januari 2017 Masa Jabatan 4 (empat) tahun (31-01-2017 s.d. 31-12-2020)	Indonesia
2.	Budi Setyono	Direktur Keuangan	15-09-2014 No.:KEP-2334/NB.1/2014	Akta No 01 Tanggal 31 Januari 2017 Masa Jabatan 4 (empat) tahun (31-01-2017 s.d. 31-12-2020)	Indonesia
3.	Asep Gunawan Sirad	Direktur Operasional	10-03-2014 No.:KEP-111/NB.1/2014	Akta No 01 Tanggal 31 Januari 2017 Masa Jabatan 4 (empat) tahun (31-01-2017 s.d. 31-12-2020)	Indonesia

Selama tahun 2019 tidak terdapat perubahan susunan anggota Direksi

B. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi untuk kepentingan Perseroan, mengelola bisnis dan urusan Perseroan dengan tetap memperhatikan

keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas Perseroan. Direksi bertindak secara cermat, berhati-hati dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi menggunakan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan Perseroan semata.

Direksi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Tugas pokok Direksi adalah :
 - a) Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan;
 - b) Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Direksi bertanggungjawab penuh melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus menginformasikan atau mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, yaitu :
 - a) Setiap perubahan penyertaan saham Perseroan pada perusahaan lain baik berupa pengalihan saham, pengurangan saham, maupun peningkatan saham. Direksi harus mendapatkan persetujuan Komisaris Utama dan salah satu anggota Komisaris. Atau apabila Komisaris Utama berhalangan, maka untuk tindakan tersebut Direksi harus mendapatkan persetujuan dari 2 (dua) orang anggota Komisaris Perseroan.
 - b) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan atau sama lain harus mendapatkan persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para Pemegang Saham yang memiliki sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling

sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- c) Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan di atas, wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
- 5. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama tersebut telah disetujui dalam Rapat Direksi. Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- 6. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggungjawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam Surat Kuasa.

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

C. Frekuensi rapat Direksi yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 17 bahwa "Direksi Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan".

Selama tahun 2019, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan jumlah kehadiran sebagai berikut :

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Tri Budhi Muljawan	12	-	100 %
2.	Budi Setyono	12	-	100 %
3.	Asep Gunawan Sirad	12	-	100 %

9.3 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

A. Profil Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarganegaraan
1.	Rodhiallah	Komisaris Utama	Keputusan Dewan Komisiner OJK 10-03-2014 No.:KEP-107/NB.1/2014	Akta No 01 Tanggal 31 Januari 2017 Masa Jabatan 4 (empat) tahun (31-01-2017 s.d. 31-12-2020)	Indonesia
2.	Syafrial Firdaus	Anggota Komisaris	Keputusan Dewan Komisiner OJK 25-09-2015 No.:KEP-619/NB.11/2015	Akta No 01 Tanggal 31 Januari 2017 Masa Jabatan 4 (empat) tahun (31-01-2017 s.d. 31-12-2020)	Indonesia
3.	Dini Rosdini	Komisaris Independen		Akta No 39 Tanggal 26 November 2019 Periode Tahun 2019-2023	Indonesia

B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris adalah :

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan RUPS dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
4. Meneliti dan menelaah Laporan Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Apabila Komisaris menolak untuk menandatangani laporan tersebut, maka penolakan beserta alasannya harus dinyatakan secara tertulis.
5. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan.
6. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan.
7. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.

Agar fungsi pengawasan dan fungsi pemberi nasihat sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas dapat dilaksanakan dengan efektif, maka Dewan Komisaris bertugas pula :

1. Memberikan pendapat dan nasihat kepada manajemen tentang penentuan visi, misi, *culture* dan *value* dari Perseroan.
2. Melakukan kajian dan memberikan pendapat tentang strategi usaha yang perlu diterapkan oleh Perseroan.
3. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat sistem pengelolaan sumber daya manusia.
4. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas sistem pengendalian resiko.
5. Melakukan penilaian dan memberikan pendapat serta nasihat atas Rancangan *Business Plan* dan penjabarannya di dalam RKAP Tahunan.
6. Memberikan persetujuan atas keputusan-keputusan bisnis strategis yang menurut Peraturan Perundang-undangan dan keputusan RUPS harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
7. Memberikan penilaian atas laporan auditor internal maupun eksternal dan memberikan nasihat kepada manajemen atas hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.
8. Memberikan persetujuan atas RKAP yang diajukan oleh Direksi Perseroan setelah melakukan pemeriksaan dan pembicaraan dengan Direksi.

9. Melakukan pengawasan secara periodik atas pelaksanaan RKAP dan memberikan pendapat/persetujuan atas perubahan RKAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Menyampaikan laporan pengawasan kepada Pemegang Saham.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas di antara masing-masing anggota Dewan Komisaris agar secara khusus melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tertentu, yang dituangkan baik dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris maupun dalam hasil keputusan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris.

C. Frekuensi rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 31 bahwa "Dewan Komisaris Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan".

Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali, dimana 2 (dua) rapat diantaranya diselenggarakan setelah bergabungnya Komisaris Independen, dengan jumlah kehadiran sebagai berikut :

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Rodhiallah	13	-	100 %
2.	Syafrial Firdaus	13	-	100 %
3.	Dini Rosdini	2	-	100 %

9.4 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

A. Profil Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Kewarganegaraan
1.	Zaini Abdul Malik	Ketua DPS	Keputusan Dewan Komisiner OJK 16-03-2015 No.:KEP-488/NB.1/2015	Akta No. 38 Tanggal 28 November 2014	Indonesia

2.	Khozin Abu Faqih	Anggota	Keputusan Dewan Komisioner OJK 16-03-2015 No.:KEP-489/NB.1/2015	Akta No. 38 Tanggal 28 November 2014	Indonesia
----	------------------	---------	---	---	-----------

Selama tahun 2019 tidak terdapat perubahan susunan DPS

B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah :

1. Dewan Pengawas Syariah bertugas dan berwenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Unit Usaha Syariah milik Perseroan, serta sebagai wakil Unit Usaha Syariah Perseroan pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
2. Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap :
 - a) Kegiatan Penjaminan Syariah;
 - b) Akad Penjaminan Syariah yang dipasarkan oleh Unit Usaha Syariah milik Perseroan
 - c) Praktik pemasaran Penjaminan Syariah yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah milik Perseroan
3. Anggota Dewan Pengawas Syariah berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Unit Usaha Syariah milik Perseroan secara lengkap dan tepat waktu.

Dalam hal Dewan Pengawas Syariah menilai terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang terkait dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, Dewan pengawas Syariah wajib meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah.

C. Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 40 bahwa "DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun".

Selama tahun 2019 telah diselenggarakan rapat DPS sebanyak 4 (empat) kali, dengan jumlah kehadiran sebagai berikut :

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Zaini Abdul Malik	3	-	75 %
2.	Khozin Abu Faqih	3	-	75 %

9.5 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Audit dalam memantau dan memastikan efektivitas system pengendalian internal

- a. komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing; atau
- b. fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten, dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, terdiri atas :

- 1) Struktur, keanggotaan, dan keahlian komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

Komite Audit belum terbentuk

- 2) Tugas dan tanggung jawab komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

Komite Audit belum terbentuk

- 3) Frekuensi rapat komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Komite/fungsi yang membantu Dewan Komisaris	Rapat Komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris	
		Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1.	-	-	-
2.	-	-	-

- 4) Program kerja komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris dan realisasinya.

Komite Audit belum terbentuk

5) Struktur Komite lainnya

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor:

KEP-0024/DIR/JJ/XII/2017 tentang Komite Perseroan di bawah Direksi, struktur komite lainnya adalah sebagai berikut:

1. Komite Investasi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan 1 (satu) orang Ketua merangkap sebagai anggota, yang merupakan Direktur Keuangan, serta anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - a. Direktur Utama untuk nilai investasi lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Kepala Divisi dan/atau Kepala Bagian yang membawahi fungsi Keuangan dan Umum; dan
 - c. Kepala Divisi dan/atau Kepala Bagian yang membawahi fungsi Manajemen Risiko.
2. Komite Penjaminan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor : KEP-0012/DIR/JJ/VII/2017 tentang Wewenang Memutuskan Penjaminan dan Menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) serta Sertifikat Penjaminan, serta Keputusan Direksi Nomor : KEP-0013/DIR/JJ/VII/2017 tentang Wewenang Memutuskan Kafalah dan Menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Kafalah (SP2K) serta Sertifikat Kafalah.
3. Komite Klaim terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan anggota sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor : KEP-0006/DIR/JJ/II/2016 tentang Wewenang Memutuskan dan Menandatangani Keputusan Klaim Kredit, yaitu:
 - a. Bahwa permohonan klaim kredit untuk setiap Terjamin dengan jumlah pengajuan :
 - Sampai dengan jumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk semua jenis kredit, termasuk kredit pola potong gaji, baik kredit pola potong gaji secara langsung maupun melalui Kopkar/Koppeg yang disalurkan oleh Penerima Jaminan (Bank maupun Non Bank).

- Sampai dengan jumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kredit Konstruksi/Pengadaan Barang.

Komite Klaim diketuai oleh Kepala Divisi Manajemen Risiko & Klaim dengan beranggotakan Kepala Divisi Penjaminan dan Kepala Divisi Keuangan & Umum.

- b. Bahwa permohonan klaim kredit untuk setiap Terjamin dengan jumlah pengajuan klaim sebagaimana disebutkan pada poin a sampai dengan jumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka Komite Klaim diketuai oleh Direktur Keuangan, dengan beranggotakan Direktur Operasional, Kepala Divisi Penjaminan, Kepala Divisi Keuangan & Umum, serta Kepala Divisi Manajemen Risiko & Klaim.
 - c. Bahwa Permohonan klaim kredit untuk setiap Terjamin dengan jumlah pengajuan klaim di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan masalah khusus lainnya yang memerlukan keputusan bersama Direksi, maka Komite Klaim diketuai oleh Direktur Utama, dengan beranggotakan Direksi secara lengkap, Kepala Divisi Penjaminan, Kepala Divisi Keuangan & Umum, serta kepala Divisi Manajemen Risiko & Klaim.
4. Komite Nominasi dan Remunerasi Karyawan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan 1 (satu) orang Ketua merangkap sebagai anggota, yang merupakan Direktur Keuangan, serta anggota lainnya yang dapat berasal dari :
 - a. Direksi;
 - b. Kepala Divisi atau Kepala Bagian dan/atau Staf yang membawahi fungsi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - c. Kepala Divisi atau Kepala Bagian yang mewakili setiap Divisi di Perusahaan.

6) Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : KEP-0024/DIR/JJ/XII/2017 tentang Komite Perseroan di bawah Direksi, tugas dan tanggung jawab komite lainnya adalah sebagai berikut :

1. Tugas dan tanggung jawab Komite Investasi antara lain :

- a. Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan;
 - b. Menelaah dan memberikan saran kepala Direksi terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
 - c. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.
2. Tugas dan tanggung jawab Komite Penjaminan antara lain:
 - a. Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan operasional penjaminan, mengawasi dan melaksanakan kebijakan operasional penjaminan yang telah ditetapkan;
 - b. Melakukan Analisa kelayakan dan manajemen risiko dari setiap pengajuan permohonan penjaminan;
 - c. Memberikan keputusan penjaminan;
 - d. Menandatangani SP3 dan SP atas nama Terjamin/Debitur;
 - e. Menelaah dan memberikan saran kepada Direksi terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
 - f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Klaim antara lain:
 - a. Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan klaim dan mengawasi pelaksanaan kebijakan klaim yang telah ditetapkan;
 - b. Melakukan analisa kelayakan dan manajemen risiko dari setiap pengajuan permohonan klaim;
 - c. Memberikan keputusan klaim;
 - d. Menelaah dan memberikan saran kepada Direksi terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
 - e. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.
4. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Karyawan antara lain:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai:
 - i. Nominasi Promosi, Mutasi, Demosi bagi Karyawan;

- ii. Struktur remunerasi untuk Karyawan yang meliputi gaji, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variable;
 - iii. Kebijakan atas remunerasi untuk Karyawan;
 - iv. Besaran atas remunerasi untuk Karyawan.
- b. Membantu Direksi melakukan penilaian pencapaian target dan kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing Karyawan;
 - c. Melakukan evaluasi terhadap struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - d. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

9.6 Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

A. Fungsi Kepatuhan

1. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

Direktur Utama

2. Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan

Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawas Internal

3. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Sekretaris Perusahaan

Tujuan Jabatan :

Melakukan penegakan kepatuhan terhadap regulasi otoritas industri serta ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Compliance Officer).

Tugas dan Kewenangan :

- a) Mempublikasikan informasi terkini tentang Perseroan dalam berbagai media, baik cetak maupun elektronik
- b) Memfasilitasi pencatatan dan penyimpanan notulensi rapat pemegang saham dan rapat dewan
- c) Menyelenggarakan Rapat Manajemen, Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris (Rapat Pengurus) dan Rapat Umum Pemegang Saham

- d) Mengikuti perkembangan core business perseroan, terutama perubahan pada hukum dan peraturan
- e) Memberikan saran kepada Direksi tentang kepatuhan pada ketentuan regulasi yang berlaku.

Satuan Pengawasan Internal

Tujuan Jabatan :

Membantu Direksi merencanakan, mengelola, mengawasi dan mengendalikan kegiatan audit operasional dan keuangan serta kegiatan penyusunan SOP di Perusahaan dalam batasan standar perusahaan dan peraturan pemerintah yang berlaku dengan sasaran untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar dan/atau peraturan yang ada.

Tugas dan Kewenangan :

- a) Merancang, mengusulkan, mengimplementasi serta mengevaluasi rencana program/kebijakan Satuan Pengawas Internal dalam rangka mendukung tercapainya tujuan perusahaan
 - b) Merencanakan dan membuat program audit, menjadwalkan implementasi audit dalam rangka memastikan kesesuaian dengan peraturan/prosedur/efisiensi/fungsi kontrol manajemen yang diharapkan
 - c) Mengawasi dan memantau kegiatan operasional, menganalisa, memeriksa, melaporkan serta memberi rekomendasi dalam rangka memastikan kesesuaian dengan prosedur dan meningkatkan efisiensi
 - d) Mengawasi dan memantau kegiatan keuangan, menganalisa, memeriksa, melaporkan serta memberi rekomendasi dalam rangka memastikan bahwa distribusi kas dan penggunaannya sesuai dengan prosedur serta efisien.
 - e) Mengadakan koordinasi dengan departemen terkait dalam melakukan penyusunan standar operasi dan prosedur (SOP); mengelola dan memonitor pelaksanaannya dalam rangka memastikan keberadaan dan kesesuaian pelaksanaannya
 - f) Melakukan control & monitoring atas pelaksanaan audit program serta melaporkan hasil temuan audit kepada manajemen dengan disertai rekomendasi perbaikannya.
 - g) Merumuskan, menyusun, mengusulkan, dan melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, serta SOP divisi SPI
 - h) Melaksanakan dan mengawasi penerapan *Good Corporate Governance* di bidang tugasnya.
4. Tingkat Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin
- Perusahaan memiliki tingkat kesehatan keuangan yang memadai, dengan parameter rasio likuiditas, gearing ratio, rasio rentabilitas dan penilaian sendiri (self assessment) tata kelola perusahaan yang baik, sebagaimana dinyatakan dalam tabel dibawah ini :

No.	Jenis Rasio	Tahun 2019
1.	LIKUIDITAS	
	a. <i>Current Ratio</i>	552,97%
2.	GEARING RATIO	
	a. <i>Gearing Ratio</i> Produktif	7,03 x
	b. <i>Total Gearing Ratio</i>	27,11 x
3.	RENTABILITAS	
	a. <i>Return on Asset (ROA)</i>	1,76%
	b. BOPO	35,28%
	c. Klaim terhadap Pendapatan Imbal Jasa	83,69%
4.	Penilaian Sendiri (<i>self assessment</i>) tata kelola perusahaan yang baik. Hasil Penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) tata kelola perusahaan yang baik PT Jamkrida Jabar mendapatkan nilai 79 (tujuh puluh Sembilan) dengan predikat " Baik ", sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/SE.OJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Lembaga Penjamin.	

5. Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani & menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen

No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja/Pelaksana Fungsi
1.	Catur Priyo Widodo	Kadiv. Manrisk & Klaim
2.	Pamungkas Hendro Hartono	Sekretaris Perusahaan
3.	Irwan Budhi Setiawan	Kepala UUS

Sesuai dengan Keputusan Direksi PT Jamkrida Jabar Nomor KEPT-0006/DIRUT/VII/2017 tanggal 8 Agustus 2017, tentang Penugasan Pejabat Pelayanan Pengaduan.

B. Fungsi Auditor Internal

Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan.

1. Ruang lingkup pekerjaan audit
 - a) Memeriksa dan menilai untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan telah memadai, serta berfungsi secara efektif, efisien dan ekonomis dalam mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan, menjamin kehandalan informasi

- keuangan dan informasi operasional serta menjaga dan melindungi aset Perusahaan.
- b) Melaksanakan Audit Operasional dan ketaatan atas kegiatan manajemen yang bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan, kehandalan informasi dan pelaporan perusahaan, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
 - c) Melaksanakan audit lanjutan (audit khusus) terhadap kasus yang memiliki indikasi terjadinya kecurangan (fraud).
 - d) Melaksanakan audit kinerja atas perencanaan dan program kerja masing-masing unit kerja dan penilaian kesesuaiannya dengan tujuan perusahaan serta penilaian terhadap manajemen risiko.
 - e) Melaksanakan penugasan khusus/tambahan yang relevan dengan ruang lingkup tugas SPI.
 - f) Ruang lingkup dan frekuensi audit yang dilakukan SPI tergantung pada situasi dan kondisi tertentu seperti hasil audit sebelumnya, materialitas tingkat risiko yang melingkupi suatu kegiatan, kecukupan pengendalian internal, dan ketersediaan sumber daya SPI.
2. Struktur atau kedudukan Satuan Kerja Audit Internal
 - a) Satuan Pengawasan Internal (SPI) berkedudukan langsung di bawah Direktur Utama.
 - b) Satuan Pengawasan Internal (SPI) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Internal (Ka. SPI).
 - c) Kepala Satuan Pengawasan Internal (Ka. SPI) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
 3. Independensi auditor internal
 - a) Satuan Pengawasan Internal (SPI) secara organisasi dan pribadi harus independen terhadap aktivitas yang sedang diaudit sehingga dapat memberikan pendapat dan rekomendasi yang tidak memihak dan berprasangka buruk dalam pelaksanaan dan pelaporan auditnya. Independen dapat dicapai melalui kedudukan dalam perusahaan dan obyektivitas auditor yaitu :
 - i. Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus ditempatkan pada posisi langsung di bawah Direktur Utama sehingga pelaksanaan audit internal mendapat dukungan sepenuhnya dari Direksi dan unit kerja perusahaan, tanpa campur tangan pihak manapun;
 - ii. Satuan Pengawasan Internal (SPI) tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan operasional yang meliputi perencanaan, pengembangan, implementasi dan pelaporan unit kerja perusahaan untuk memastikan kredibilitas hasil pengawasannya.

- iii. Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus bebas dari intervensi pihak manapun dalam penetapan lingkup pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, serta dalam pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berwenang.
 - iv. Satuan Pengawasan Internal (SPI) dilarang mempunyai rasa ketakutan, loyalitas, serta ambisi yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas yang sedang dilakukan, sehingga dapat mempengaruhi tanggung jawab penugasannya.
- b) Satuan Pengawasan Internal (SPI) dikatakan bertindak obyektif bila bersikap independen dan tidak bias, serta menghindari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan.
 - i. Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus memiliki sikap mental yang obyektif, independen dan menghindari kemungkinan benturan kepentingan dalam melakukan tugas pengawasan.
 - ii. Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus yakin dapat mengambil keputusan profesionalnya secara bebas, hasil kerjanya handal, dapat dipercaya dan bebas dari pengaruh pihak luar sehingga dapat menghasilkan laporan yang obyektif serta dapat dipakai semua pihak terkait
- c) Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus menjaga integritas melalui:
 - i. Satuan Pengawasan Internal (SPI) dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pegawai, klien ataupun mitra perusahaan sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
 - ii. Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus menunjukkan sikap mental yang jujur dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya.
 - iii. Satuan Pengawasan Internal (SPI) tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat merusak citra.
- 4. Uraian tugas satuan kerja audit internal

Dalam melaksanakan tugasnya, SPI memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

 - a) Membantu Direksi dalam memenuhi tanggung-jawab pengelolaan perseroan, dengan cara audit atas ketaatan, operasional, dan kinerja seluruh kegiatan unit kerja perusahaan secara terpadu atas ketaatan, kelengkapan dan penggunaan dari pengendalian akuntansi, keuangan dan pengendalian lainnya serta

- memberikan saran-saran perbaikan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada masing-masing unit kerja dan perusahaan.
- b) Membantu Direksi dalam upaya meningkatkan terwujudnya Good Corporate Governance, mendorong efektivitas system pengendalian internal perusahaan, peningkatan pengelolaan risiko dan kinerja perusahaan serta penerapan etika bisnis;
 - c) Membantu Direksi untuk memberikan perhatian atas terjadinya perubahan lingkungan industri, risiko bisnis yang mungkin timbul, peluang upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dan hal-hal lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan;
 - d) Mendorong unit-unit kerja di lingkungan Perusahaan dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan pencapaian target kinerja unit kerja dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Perusahaan;
 - e) Memberikan penilaian tentang kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan dan pengelolaan risiko atas kegiatan perusahaan;
 - f) Melaporkan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan kelemahan dan peluang perbaikan proses pengendalian keuangan dan operasional kegiatan perusahaan;
 - g) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan diaudit, mengevaluasi serta menilai tingkat risiko kegiatan-kegiatan tersebut dalam kaitannya dengan perencanaan audit;
 - h) Memberikan laporan berkala atas hasil-hasil pelaksanaan audit semester, tahunan, dan audit lanjutan (audit khusus) serta kecukupan sumber daya audit;
 - i) Memberikan rekomendasi perbaikan atas proses bisnis dan pengendalian internal perusahaan;
 - j) Memantau pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit (LHA).

5. Profil Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Belum Ada

6. Jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal

Jumlah pegawai yang berada dibawah Divisi Satuan Pengawasan Internal (SPI) PT Jamkrida Jabar saat ini, hanya 1 (satu) orang staf.

7. Laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal

Laporan hasil pelaksanaan audit internal disampaikan langsung oleh internal audit kepada Direktur Utama.

Laporan tersebut berisi rekomendasi dan tindakan perbaikan, serta tanggapan dari sektor terkait.

C. Fungsi Auditor Eksternal

Efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap ketentuan, antara lain mengenai penyediaan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan Lembaga Penjamin dengan standar audit yang berlaku.

Pada saat pemeriksaan oleh Auditor Eksternal telah dilakukan komunikasi dan kerja sama yang baik antara Auditor Eksternal dan pihak Manajemen yang dilakukan secara intensif. Direksi mendukung adanya temuan-temuan yang terkait dengan kebijakan akuntansi, interpretasi standar akuntansi yang berlaku, perkembangan peraturan OJK dan lain-lain. Direksi juga memantau secara aktif tindak lanjut temuan pemeriksaan Auditor Eksternal tersebut sehingga diharapkan temuan serupa tidak terulang dimasa mendatang.

Penerapan Fungsi Audit Eksternal telah berjalan dengan baik, yang dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

1. Perseroan selalu menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK.
2. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Perseroan tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
Kantor akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel dibawah.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah memperoleh persetujuan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
4. Penugasan pemeriksaan kepada Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek sebagai berikut :
 - i. Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;
 - ii. Legalitas perjanjian kerja;
 - iii. Ruang lingkup audit;
 - iv. Standar profesional akuntan publik; dan
 - v. Komunikasi antara OJK dengan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.
5. Akuntan Publik yang ditunjuk telah:
 - i. Menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada Perseroan tepat waktu.

- ii. Mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

Kantor akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan Lembaga Penjamin selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran di OJK	Biaya Auditor Eksternal
2019	Bambang Sudaryono & Rekan	1. Drs. Bambang Sudaryono, Ak., MBA 2. Drs. Sudarmadji Herry Sutrisno, Ak., MM., CPA	Rp 82.500.000,00
2018	Bambang Sudaryono & Rekan	1. Drs. Bambang Sudaryono, Ak., MBA 2. Drs. Sudarmadji Herry Sutrisno, Ak., MM., CPA No.Pendaftaran di OJK 205	Rp 82.500.000,00
2017	Husni, Mucharam & Rasidi (HMR)	Supandi	Rp 99.000.000,00
2016	Husni, Mucharam & Rasidi (HMR)	Husni	Rp 99.000.000,00
2015	Husni, Mucharam & Rasidi (HMR)	Husni	Rp 99.000.000,00

9.7 Penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, Dan Tata Kelola Teknologi Informasi

A. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

- Direksi bertanggungjawab terhadap penerapan strategi dan kebijakan manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan tata kelola teknologi informasi serta memberikan laporan kepada Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris, mengawasi tingkat efektifitas dan pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan.

B. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penggunaan teknologi informasi

Kebijakan manajemen risiko, prosedur dan penggunaan teknologi informasi, mengharuskan perseroan patuh terhadap ketentuan dan regulasi yang telah ditetapkan.

C. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi

Kebijakan ini menetapkan prinsip dan proses manajemen risiko yang dilaksanakan dengan tahapan : identifikasi risiko, penilaian risiko, penanganan risiko dan monitoring serta evaluasi.

D. Struktur organisasi sistem informasi

Organisasi Pengelolaan SMI PT Jamkrida Jabar terdiri atas :

1. Pengelola data (admin).
2. PIC User (setiap divisi).

E. Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi

Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi mengacu kepada SOP Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen dan Pedoman *Disaster Recovery Plan* Perseroan.

F. Sistem pengendalian internal yang menyederhanakan

Kepatuhan terhadap kebijakan dan panduan risiko secara regular dipantau oleh unit kerja yang bersangkutan.

9.8 Penerapan Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai

A. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

- a) Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya.

Pada tahun 2019 Perusahaan memberikan remunerasi dalam bentuk non natura kepada Direksi, Dewan Komisaris dan DPS yaitu berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan pajak, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, insentif serta tantiem yang berasal dari laba bersih Perseroan.

- b) Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya

Pada tahun 2019 terdapat fasilitas lain bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS, antara lain tunjangan Purna Jabatan (Direksi dan Komisaris), tunjangan transportasi (khusus Direksi), tunjangan komunikasi, asuransi kesehatan dan mobil dinas.

B. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun

- a) Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS.

Pada tahun 2019, RUPS menetapkan kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS antara lain berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan pajak, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, insentif serta tantiem yang berasal dari laba bersih Perseroan.

- b) Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.

3 orang Direksi, 3 orang Dewan Komisaris, dan 2 orang Dewan Pengawas Syariah.

Jumlah yang diterima dalam satu tahun	Remunerasi*)	Fasilitas lain dalam bentuk natura **)
---------------------------------------	--------------	--

Direksi	Jumlah Direksi	3	3
	Nominal (Jutaan Rupiah)	3.480	583
Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Komisaris	3	3
	Nominal (Jutaan Rupiah)	664	159
DPS	Jumlah DPS	2	2
	Nominal (Jutaan Rupiah)	104	15

Keterangan:

*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura

**) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya

- c) Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Jumlah DPS
Di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	0	0	0
Di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s.d Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	3	0	0
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	0	0	0
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kebawah	0	3	2

Keterangan:

Jumlah yang tercantum diambil dari total THP Bruto per tahun buku 2019

C. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

- 1) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;
- 2) rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah;
- 3) rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah; dan
- 4) rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.

Rasio gaji
1) 6,39 : 1
2) 1,15 : 1
3) 1,15 : 1
4) 2,40 : 1

9.9 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Lembaga Penjamin

Perseroan telah menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan mengenai Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin dengan rincian sebagai berikut :

- A. Perseroan telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
- B. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dipublikasikan melalui website www.jamkrida-jabar.co.id dan media cetak.
- C. Informasi mengenai produk-produk jasa penjaminan yang diterbitkan oleh perseroan tersedia pada website.

9.10 Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham

No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1.	Tidak Ada	A	Nihil	Nihil
		B	Nihil	Nihil
		C	Nihil	Nihil
		D	Nihil	Nihil

Keterangan :

- A. Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
- B. Lembaga penjamin lain;
- C. Perusahaan jasa keuangan selain lembaga penjamin; dan

- D. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

9.11 Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat

- A. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	Tri Budhi Muljawan	Direksi lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
2.	Budi Setyono	Direksi lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
3.	Asep Gunawan Sirad	Direksi lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang saham		√		√	

- B. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	Rodhiallah	Direksi lainnya		√		√	

		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
2.	Syafrial Firdaus	Direksi lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
3.	Dini Rosdini	Direksi lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang saham		√		√	

- C. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	Zaini Abdul Malik	Direksi lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
2.	Khozin Abu Faqih	Direksi lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang saham		√		√	

Keterangan :

Hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, Lembaga Penjamin yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, dan/atau pemegang saham pengendali Lembaga Penjamin.

Hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi orang tua kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya, anak kandung/tiri/angkat, kakek/nenek kandung/tiri/angkat, cucu kandung/tiri/angkat, saudara kandung/ tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya, mertua, besan, suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat, kakek atau nenek dari suami atau istri, suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat, dan saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

D. Pengungkapan hal penting lainnya

1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal

Tidak Ada

2. Transaksi material dengan pihak terkait

Tidak Ada

3. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan*)
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-

Keterangan:

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

Selama tahun 2019, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di Perseroan

4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin

Tidak Ada

5. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen

Tidak Ada

6. Tenaga kerja asing

No.	Nama	Jabatan	Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	KITAS		IMTA	
				Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku
1.	-	-	-	-	-	-	-

7. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*)

Selama tahun 2019, tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap

Penyimpangan internal dalam 1 (satu) tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh		
	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Total penyimpangan	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-

8. Permasalahan hukum

Selama tahun 2019, tidak terdapat permasalahan hukum baik perdata maupun pidana.

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap a. b.	Nihil	Nihil

Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk kasus perdata a. b.	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

9. Etika bisnis Lembaga Penjamin

Etika bisnis yang dijadikan acuan bagi Perseroan dan seluruh karyawan termuat dalam Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) PT Jamkrida Jabar.

LAPORAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)



BAB X

LAPORAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*(CSR)

Sebagai bentuk kepedulian Perseroan kepada lingkungan dan masyarakat, maka Perseroan secara rutin tiap tahunnya menyalurkan biaya CSR kepada sasaran yang tepat, baik itu kepada korban bencana alam, kepada yayasan yatim piatu, ataupun bantuan lainnya. Berikut ini adalah penyaluran dana CSR PT Jamkrida Jabar pada periode tahun 2018:

DAFTAR BANTUAN CSR PERIODE 2019

NO	BENTUK CSR	TANGGAL	NOMINAL CSR (RUPIAH)
1	Bantuan dana acara peringatan Maulid Nabi UIN Bandung	31/12/2019	1.000.000
2	Bantuan pembelian mesin potong rumput RW 11 Kel Sekejati	31/12/2019	500.000
3	Bantuan acara khitan massal Masjid Al - Hidayah	30/12/2019	2.000.000
4	Partisipasi acara hari ibu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Binangkit	30/12/2019	1.500.000
5	Partisipasi pembangunan SDIT At Tauhid KBB	29/11/2019	1.500.000
6	Partisipasi acara sunatan massal Karim Miftahul Huda	08/11/2019	2.500.000
7	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan dana Acara Gelar Produk Dan Temu Bisnis UMKM Kabupaten Bandung Bantuan dana pembangunan Masjid Assajidin Kiaracondong 	22/10/2019	5.500.000
8	Bantuan CSR Panti Asuhan Anak Saleh	07/10/2019	6.000.000

NO	BENTUK CSR	TANGGAL	NOMINAL CSR (RUPIAH)
9	Partisipasi penyelenggaraan kegiatan tahun baru Islam DKM At Takwa Arcamanik	18/09/2019	1.000.000
10	Partisipasi kegiatan Qurban di DKM Al Mansyur	29/08/2019	1.000.000
11	Partisipasi kegiatan Qurban di Yayasan Nur Ummat	29/08/2019	4.125.000
12	Partisipasi dana kegiatan kurban lingkungan RW11 Kel Sekejati	12/08/2019	500.000
13	Partisipasi dana kegiatan kurban untu duaafa via Qurban Juara Indonesia	12/08/2019	19.950.000
14	Partisipasi Kegiatan Camp Generasi Milenial Daurah 1 Pusdai	02/08/2019	5.000.000
15	Partisipasi Kegiatan Doa & Makan Santri Yatim Qahwa	15/07/2019	1.500.000
16	Partisipasi untuk Pramuka Tunarungu Indonesia	11/07/2019	500.000
17	Partisipasi kegiatan Ramadhan Yayasan Islam Al Khairin	27/06/2019	2.500.000
18	Partisipasi kegiatan itikaf Ramadhan Masjid Agung Al-Ukhuwah	27/06/2019	2.500.000
19	Bantuan dana santunan anak yatim Yayasan Al Baari	19/06/2019	1.250.000
20	CSR kegiatan Ramadhan Yayasan Dharma Ranca Buana	19/06/2019	2.500.000
21	Partisipasi Kegiatan Ramadhan FK MTI Riung Bandung	28/05/2019	1.000.000

NO	BENTUK CSR	TANGGAL	NOMINAL CSR (RUPIAH)
22	Bantuan Renovasi Mushola Al Fatah Bekasi	28/05/2019	1.000.000
23	Partisipasi Kegiatan Pesantren Ramadhan Yayasan Nur Ummat	28/05/2019	3.550.000
24	CSR kepada Pos PAUD Flamboyan Riung Bandung	28/05/2019	1.000.000
25	CSR kepada Panti Asuhan Yayasan Anak Saleh Bdg	17/05/2019	5.600.000
26	Partisipasi Pesantren Kilat Yayasan Persada Utama	16/05/2019	10.000.000
27	Partisipasi kegiatan Ramadhan PC Salimah Bubat	29/04/2019	1.500.000
28	Partisipasi kegiatan renovasi Masjid Miftahul Huda Ciamis	28/02/2019	1.000.000
29	Partisipasi bantuan berupa komputer untuk SMPN 2 Cileunyi	28/02/2019	4.000.000
30	Partisipasi Kegiatan Penanggulangan DBD oleh LSM Bina Keluarga Sakinah	27/02/2019	5.000.000
31	Partisipasi CSR bantuan Bank Sampah lingkungan RW 11 Kel Sekejati	27/02/2019	300.000
32	Partisipasi kegiatan Bank Sampah Capetang RW11 Kel Sekejati	11/02/2019	5.000.000
33	Partisipasi bantuan dana kepada Yayasan Bina Insan Ar Rahman	11/02/2019	5.000.000
34	Partisipasi kegiatan forum silaturahmi PC Bubat	11/02/2019	2.500.000
35	Partisipasi acara ALYSCO SMP Al Azhar 36 Bandung	11/02/2019	1.500.000
TOTAL			110.775.000



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT JAMKRIDA JABAR
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2019**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Budhi Muljawan
Alamat kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 592 - Bandung
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Budi Setyono
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 592 – Bandung
Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT Jamkrida Jabar tahun buku 2019.
2. Laporan Keuangan PT Jamkrida Jabar sebagaimana dimaksud butir 1 diatas telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Jamkrida untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 ;
 - a. Telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Patuh dan bertanggungjawab terhadap sistem pengendalian intern yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandung, 06 April 2020

PT JAMKRIDA JABAR



Tri Budhi Muljawan
Direktur Utama

Budi Setyono
Direktur Keuangan

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Drs. BAMBANG SUDARYONO & REKAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
Izin Usaha : KEP-184/KM.17/1999

Nomor: 00094/2.0326/AU.1/09/0411-2/1/IV/2020

Laporan Auditor Independen

Kepada Yth.
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Jamkrida Jabar

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Jamkrida Jabar yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan perusahaan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Jamkrida Jabar tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KAP Drs. Bambang Sudaryono & Rekan



Drs. Sudarmadji Herry Sutrisno, Ak., MM., CPA., CA.
Surat Izin Akuntan Publik No: AP. 0411

6 April 2020

PT JAMKRIDA JABAR
 LAPORAN POSISI KEUANGAN
 PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam Rupiah penuh)

	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	2a, 3	171.333.693.369	139.760.660.474
Piutang Re/Cogaran	2e, 4	3.455.037.602	8.000.292.199
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	2e, 5	1.069.665.915	659.562.342
Beban Dibayar Dimuka	2f, 6a	16.522.765.653	11.766.542.206
Aset Keuangan	2d, 7	35.091.999.415	2.000.000.000
Properti Investasi	8	2.472.000.000	2.445.000.000
Jumlah Aset Lancar		231.965.361.954	164.654.077.221
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap			
<i>setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 3.659.535.958 dan Rp 3.122.851.605 masing- masing per 31 Desember 2019 dan 2018</i>	2g, 9	11.699.143.923	12.246.524.776
Beban Dibayar Dimuka - Jangka Panjang	2f, 6b	94.166.001.739	40.751.574.357
Aset Keuangan - Jangka Panjang	2d, 7	14.071.246.250	40.117.661.442
Aset Pajak Tangguhan	2m, 16d	7.270.566.929	6.656.019.590
Aset Lain-Lain	2h, 10	974.836.625	717.052.107
Jumlah Aset Tidak Lancar		128.183.797.466	100.688.852.272
JUMLAH ASET		360.149.159.420	265.342.929.494
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Pajak	2m, 16a	363.573.006	275.360.912
Utang Re/Cogaran	11	4.572.266.614	3.269.613.327
Beban yang Masih Harus Dibayar	12	696.401.062	1.267.537.773
Penampungan Sementara	13	4.006.552.513	3.046.703.129
Utang Lancar Lainnya	14	12.894.322	65.470.402
Pendapatan Diterima Dimuka - Jangka Pendek	15a	32.073.362.791	23.943.191.544
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		41.949.072.310	31.889.877.087
Liabilitas Jangka Panjang			
Pendapatan Diterima Dimuka - Jangka Panjang	15b	151.295.064.396	70.909.003.622
Cadangan Klaim	2p, 16	4.050.464.351	3.192.039.354
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	2l, 17	1.776.025.036	1.266.627.196
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		157.121.573.787	75.367.870.372
JUMLAH LIABILITAS		199.070.646.097	107.257.747.460
EKUITAS			
Modal	19	153.200.000.000	153.200.000.000
<i>Modal dasar sebesar dari 30.000 lembar saham, modal ditempatkan dan disetor penuh per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebanyak 15.320 lembar saham dengan nilai nominal Rp 10.000.000 per lembar saham.</i>			
Cadangan Umum	19	4.084.651.667	3.761.254.326
Saldo Laba	19	3.907.910.566	1.333.590.235
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga	2d, 7	67.155.374	(66.000.000)
Kerugian Imbalan pasti setelah aset pajak tangguhan		(211.204.526)	(143.662.529)
JUMLAH EKUITAS		161.078.513.323	158.085.182.034
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		360.149.159.420	265.342.929.494

Catatan atas laporan keuangan merupakan
 bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
PENDAPATAN PENJAMINAN			
Imbal Jasa Penjaminan / Kafalah	2j, 2n, 20	47.732.911.076	41.301.947.325
Beban Akuisisi	2j, 2n, 20	(6.835.633.831)	(5.414.653.696)
Restitusi IJP	2j, 2n, 20	(1.773.298.834)	(1.434.279.301)
Manajemen Fee	2j, 2n, 20	3.219.641.076	744.034.313
JUMLAH PENDAPATAN PENJAMINAN		42.343.818.489	35.197.018.641
BEBAN KLAIM			
Beban Klaim	2j, 2p, 22	(22.636.374.896)	(22.490.345.113)
Pemulihan Cadangan Klaim	2j, 2p, 22	(656.424.997)	265.769.987
Beban Regaransi	2j, 2p, 22	(14.266.663.642)	(11.580.609.266)
JUMLAH BEBAN KLAIM		(37.763.683.535)	(33.805.384.394)
PENDAPATAN PENJAMINAN BERSIH		4.580.134.954	1.391.634.247
Pendapatan Operasional			
Pendapatan Investasi	2j, 21	14.935.391.990	13.359.578.616
Pendapatan Subrogasi	2j, 24	3.218.321.634	3.231.634.226
Pendapatan (Beban) Lain-lain	2j, 25	(2.379.181.041)	(1.649.130.001)
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		20.354.607.337	16.333.717.088
BEBAN USAHA			
Beban Operasional	2j, 23	(2.001.361.567)	(1.580.905.049)
Beban Sumber Daya Manusia	2j, 23	(11.415.120.309)	(11.074.805.430)
Beban Administrasi dan Umum	2j, 23	(3.422.310.413)	(2.646.274.500)
JUMLAH BEBAN USAHA		(16.838.792.289)	(15.501.984.979)
LABA SEBELUM PAJAK		3.515.875.248	831.732.109
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			
Beban Pajak Kini	2m, 16b	-	-
Manfaat Pajak Tangguhan	2m, 16d	392.035.340	501.858.126
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN		392.035.340	501.858.126
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		3.907.910.588	1.333.590.235
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI			
Pajak penghasilan terkait pos-pos			
yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi	16d	22.513.999	(39.061.939)
JUMLAH POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI		(67.541.997)	117.185.816
LABA KOMPREHENSIF		3.840.368.591	1.450.776.051

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Halaman ini sengaja dikosongkan



PT JAMKRIDA JABAR



info@jamkrida-jabar.co.id



Jl. Soekarno Hatta No.592, Buahbatu



<https://jamkrida-jabar.co.id>